



Kementerian PPN/
Bappenas



Knowledge Sharing
PEMBANGUNAN DAERAH

PRAKTIK-PRAKTIK CERDAS



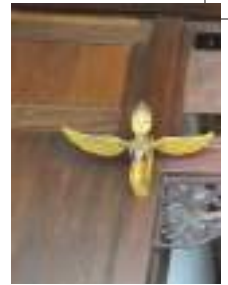


Kementerian PPN/
Bappenas

Knowledge Sharing
PEMBANGUNAN DAERAH

PRAKTIK-PRAKTIK CERDAS

Diterbitkan oleh:
Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas



Knowledge Sharing

PEMBANGUNAN DAERAH

PRAKTIK-PRAKTIK CERDAS

ISBN	: 978-623-90225-3-2
Penanggungjawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
Tim Penulis	: Agustin Arry Yanna, Andi Setyo Pambudi, Zita Setyaningrum, Laily Rahmatika
Editor Utama	: Maria Hartiningsih
Kontributor	: Tim Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas
Diterbitkan oleh	: Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas

Isi dan materi yang ada dalam buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

© Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, 2018



Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ucapan Terimakasih	iv
Bab I. Pendahuluan	00
Bab II. Perencanaan Inklusif	04
A. Pelibatan <i>Multi Stakeholders</i>	09
B. Menyerap Aspirasi Masyarakat untuk Perencanaan.....	13
C. Pemanfaatan Teknologi Untuk Optimalisasi Proses Perencanaan	16
D. Perencanaan Pembangunan dan Kearifan Lokal	18
Bab III. Pelayanan Publik	22
A. Banyuwangi, Mall Bukan Tempat Belanja!	29
Suatu Pagi Di Rumah Mbah Kesi	33
B. <i>Link And Match</i> Di SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah.....	34
Bab IV. Penataan Permukiman	36
A. Solo Tak Hanya Bengawan Solo	42
1. Rumah Deret	43
2. Rumah Susun Sewa	44
3. Hunian Sementara	45
4. Revitalisasi Sungai	46
B. Keasrian Tukad Bandu	48
Bab V. Pariwisata	52
A. Apel Malang, Bukan Apel Batu	65
B. Banyuwangi, <i>The Sunrise of Java</i>	68
Gandrung Sewu	72
Bab VI. Ekonomi Kreatif	74
A. Jatimnomic	78
B. Tegal, Jepang-nya Indonesia	82
C. Bencana dan Harapan Kemajuan	84
D. Solo <i>Technopark</i>	86
E. Terus Berupaya	87
Bab VII. Sistem Informasi	92
A. Teknologi Informasi	95
B. Solo <i>Destination</i>	97
C. <i>E-Government</i>	99
Bab VIII. Kesimpulan	102

Kata Pengantar



Prof. Bambang P. S. Brodjonegoro, Ph. D

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Bappenas

Untuk bertutur menuliskan praktik-praktik cerdas yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di pelosok negeri, dibutuhkan suatu bingkai bersahaja namun unik, menarik, dan bermanfaat. Bingkai tersebut dibentuk melalui pengartikulasian dari hasil-hasil evaluasi pembangunan daerah.

Berawal dari penyelenggaraan pemberian penghargaan untuk perencanaan pembangunan daerah terbaik oleh Bappenas, yakni Pangripta Nusantara dari tahun 2011 sampai 2017, ide penyusunan buku *knowledge sharing* ini dirasakan mendesak untuk diwujudkan. Bersamaan dengan transformasi dari Pangripta Nusantara menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD mulai tahun 2018, penyusunan buku ini dipertimbangkan dapat menggaungkan manfaat dari pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah tersebut.

Sebuah pertanyaan menggelitik dilontarkan oleh seorang sahabat, ketika sudah mendapatkan penghargaan sebagai yang terbaik, *what is next*. Ketika gelar terbaik diterima oleh satu daerah, bukan berarti daerah yang lain tidak baik. Namun untuk menularkan kebaikan-kebaikan tersebut perlu komunikasi, untuk menerbitkan semangat menjadi lebih baik lagi.

Komunikasi untuk menyampaikan praktik-praktik cerdas di daerah, dilakukan melalui banyak cara. Salah satu yang paling biasa dilakukan adalah melalui pertemuan seperti diseminasi, seminar, *workshop*, atau *talkshow*. Cara lain yang lebih mudah mengingat keterbatasan ruang dan waktu, adalah melalui penulisan buku *knowledge sharing* ini.

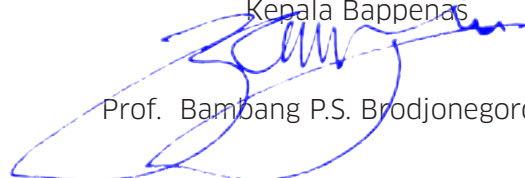
Buku *knowledge sharing* ini diharapkan dapat menyodorkan tawaran alternatif solusi untuk permasalahan yang muncul di daerah, tentu dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang di daerah tersebut.

Namun, dengan memahami penyelesaian masalah melalui praktik-praktik cerdas, suatu daerah bisa merefleksikan yang terjadi di daerahnya dan mendapatkan referensi bagaimana menemukan solusi persoalan dengan modifikasi, disesuaikan dengan situasi di daerah masing-masing.

Dengan demikian, setiap pemecahan masalah tidak dilakukan dari nol, tetapi berdasarkan kondisi yang ada (*not scratch from the zero point*), sehingga bisa lebih efisien, efektif, dan kreatif dalam membangun daerahnya. Semoga yang sudah dicapai oleh berbagai daerah dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan.

Terimakasih, selamat bekerja dan berkreasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Bappenas



Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Ph.D

Ucapan Terimakasih



Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan

Proses penyusunan buku ini melibatkan para pihak yang memiliki perhatian besar pada pembangunan daerah. Muara kemajuan provinsi, kabupaten/kota terletak pada keselarasan antara perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dan pencapaian tujuan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Keinginan untuk lebih maju, kerjasama, dan saling berbagi kisah sukses, menjadi motivasi penyusunan buku *knowledge sharing* ini. Sumber penulisan buku ini tidak dibatasi hanya dari hasil Penghargaan Pembangunan Daerah 2018, tetapi juga dari pembelajaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pembangunan daerah diolah dan diartikulasikan melalui pertemuan, diskusi, *knowledge sharing*, konfirmasi, dan re-konfirmasi baik di Jakarta maupun di daerah terkait, menjadi bahan yang kemudian ditulis dalam buku ini.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang terlibat dengan berkontribusi terhadap kehadiran buku ini. Terimakasih kami haturkan kepada Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah 2018, para Pemimpin Daerah peserta PPD 2018, khususnya Bapak Bupati Banyuwangi, Bapak Walikota Palu, Ibu Walikota Batu, Ibu Bupati Tegal, para Kepala Bappeda peserta PPD 2018, khususnya Kepala Bappeda Kota Surakarta, Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur, dan para kontributor lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Meskipun masih jauh dari sempurna, kami berharap buku ini dapat menginspirasi untuk memunculkan alternatif untuk menanggapi permasalahan atau mengoptimalkan hasil kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan di daerah. Semoga penyusunan buku *knowledge sharing* ini dapat berlanjut pada masa-masa mendatang dengan perbaikan dan penajaman. Terimakasih.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan



Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP

Ucapan Terimakasih



BAB I PENDAHULUAN



Gambar: Revitalisasi Kali di Surakarta

Gaung pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah 2018 meninggalkan kesan kuat di pelosok negeri. Banyak media cetak maupun *on-line* mengabarkan daerah-daerah terbaik untuk perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah.

Salah satu alasannya, mungkin karena Presiden RI yang menyampaikan sendiri pengumuman daerah-daerah terbaik, bersamaan dengan Pembukaan Musrenbangnas RKP 2019 di Jakarta.

Mungkin hasil akhir PPD 2018 tidak bisa memuaskan banyak pihak. Sebagian menyisakan pertanyaan, mengapa tidak menjadi yang terbaik. Namun, pertanyaan yang muncul itu justru menunjukkan dampak positif, yakni keinginan menjadi lebih baik pada masa mendatang.

Penyusunan buku *Knowledge Sharing* ini adalah langkah awal, sebagai sarana berkomunikasi mengenai pembangunan daerah secara fleksibel. Bisa juga seperti menyodorkan sebuah jendela, untuk melongok yang telah dilakukan daerah lain, mempelajari dan memahami praktik-praktik cerdas sebagai solusi atas permasalahan di daerah lain.

Menjadi menarik, ketika masing-masing daerah memasukkan kearifan lokal atau *local wisdom* dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Kearifan lokal adalah seperangkat gagasan, nilai atau pandangan mengenai kebijaksanaan dan kecendekiaan; suatu rangkuman pengetahuan yang ditemukan melalui akumulasi pengalaman oleh leluhur atau nenek-moyang di suatu tempat.

Kearifan lokal atau *local wisdom* itu terkandung dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu dan permainan rakyat. Nilai-nilai itu diyakini dan dijalani oleh masyarakatnya secara turun-temurun dari generasi ke generasi dari mulut ke mulut, sehingga menjadi budaya dan bahasa yang sudah memasuki ruang batin masyarakatnya, diintegrasikan dan dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari.

Pembelajaran dan pemahaman mengenai kearifan lokal ini, selain menawarkan alternatif solusi juga mendorong daerah menggali



potensi masing-masing dan membangun selaras dengan kebudayaan dan masyarakat setempat.

Mencermati banyak cerita keberhasilan dalam pembangunan daerah, isu-isu yang mengemuka pada daerah-daerah yang dinilai terbaik ini dikelompokkan secara tematik.

Tema-tema tersebut meliputi proses perencanaan yang inklusif, pengembangan ekonomi secara kreatif, pelayanan publik yang menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, penataan permukiman yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat, pengembangan pariwisata yang menyinergikan alam-lingkungan, budaya dan masyarakat, serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

Pada kesempatan pertama ini, Tim Penulis berupaya menyampaikan pembelajaran dari daerah-daerah terbaik tahun 2018 plus daerah terbaik dari tahun sebelumnya. Wilayah Indonesia yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten serta kota, merupakan lahan subur bagi kegiatan pembangunan yang berkembang penuh warna.

Tulisan sederhana praktik-praktik cerdas ini diharapkan dapat berlanjut hingga dapat merengkuh tema-tema lain untuk praktik-praktik cerdas lain yang lebih segar dan inovatif.



Gambar: Balai kota kota Batu



BAB II

PERENCANAAN INKLUSIF



Gambar: Sungai Musi, Palembang

*As we embark on this great collective journey, we pledge that
no one will be left behind.*

*Recognizing that the dignity of the human person is
fundamental, we wish to see the Goals and targets met for all
nations and peoples and for all segments of society. And we
will endeavor to reach the furthest behind first*

(UNGA Resolution, 2015)

“*Leave no one behind*” telah menjadi frasa yang bergaung di seluruh dunia, sebagai komitmen global untuk mencapai kemajuan yang komprehensif dalam Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.

Namun sebenarnya, itulah inti dari proses demokrasi yang sedang berlangsung; suatu proses untuk memastikan pembangunan yang inklusif, yang mendorong seluruh komponen masyarakat mengenali isu-isu pembangunan yang dihadapi dan berpartisipasi dalam menanggapi. Dan kemudian, menikmati hasil yang adil dan setara dari upaya tersebut.

Tak satu pun yang ditinggalkan...

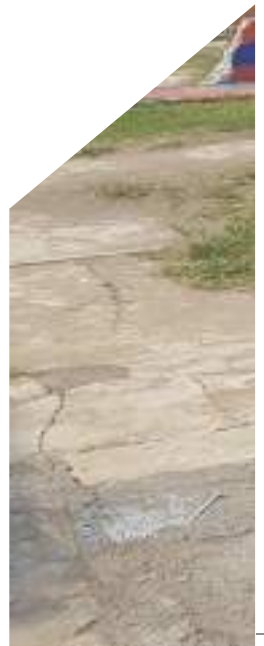
Pembangunan yang inklusif mensyaratkan pendekatan terintegrasi, pemerintahan yang efektif, kebijakan yang terkoordinasi, di samping koherensi lintas lembaga pemerintah dan antar pemangku kepentingan. Artinya, interaksi antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan lingkungan harus bisa dipahami sepenuhnya. (UNDP/ UNEP 2013).

Perencanaan yang inklusif bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mencapai cita-cita yang mulia itu, tetapi perencanaan inklusif merupakan prasyarat penting untuk mencapainya. Yang juga patut dicatat adalah kenyataan bahwa perencanaan inklusif memerlukan rancangan untuk menjadi pemandu dari visi pembangunan.

Seperti dikemukakan Kei Sakamoto dalam *Efforts to Introduce Inclusive Planning in Egypt* (2013), perencanaan inklusif harus mengadopsi perspektif jangka menengah hingga panjang; tidak hanya memeriksa tujuan jangka pendek (kerangka waktu inklusif) yang biasanya dilakukan untuk memberi kesan kesungguhan.

Perencanaan inklusif mengingatkan kita pada pentingnya memasukkan perspektif jangka panjang selama prosedur perencanaan, tetapi tetap lentur terhadap dinamika dan kenyataan yang sedang berlangsung.

Inklusif artinya melibatkan banyak pihak secara proporsional. Perencanaan inklusif bisa diartikan perencanaan yang melibatkan para pihak yang relevan sesuai porsi masing-masing. Perencanaan pembangunan yang inklusif merupakan prasyarat perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang baik dalam skala nasional maupun daerah.



Melalui perencanaan inklusif dihasilkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang menghasilkan keputusan-keputusan bersifat fundamental, memberi arah, dan berorientasi masa depan. Namun perencanaan strategis tidak meramalkan masa depan atau berupa keputusan-keputusan penting yang tidak dapat dirubah. Sebaliknya, perencanaan strategis itu merupakan suatu proses yang tidak linier dan tidak mudah diramalkan.

Oleh karena sifat itulah maka perencanaan strategis harus dimiliki oleh setiap organisasi sebagai tanggapan terhadap situasi lingkungan yang sangat dinamis dan sulit diramalkan.

Meski demikian, harus diingat, bahwa memperkenalkan proses perencanaan yang demokratis membutuhkan waktu dan hampir seluruh upaya merupakan proses, bukan hasil akhir.

Untuk mengembangkan demokrasi, langkah awal yang harus diambil adalah pelembagaan dan pengembangan kapasitas organisasi perencanaan dalam prosedur perencanaan kebijakan. Untuk semua itu, dibutuhkan komitmen kuat dan ketekunan karena harmonisasi yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan seringkali harus melewati jalan berliku.



Gambar: Goedang Boencit, Palembang

Proses Panjang

Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan terkait pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan selalu diikuti pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Proses perencanaan inklusif di Indonesia merupakan proses yang panjang. Berakhirnya era Orde Baru membawa beberapa perubahan dalam proses pengambilan keputusan, dari proses perencanaan *top-down* ke pendekatan *bottom-up*, termasuk beberapa kelembagaan di tingkat warga.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mensyaratkan dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Perwakilan berbagai pemangku kepentingan diikutsertakan bergabung melalui prosedur perencanaan dan bekerja untuk menyesuaikan perspektif mereka. Tentu saja, semua ini membutuhkan banyak usaha dan waktu, tetapi pemerintah Indonesia mengakui langkah ini sebagai biaya yang diperlukan untuk demokratisasi dan pemerintahan yang baik (Iijima, 2005).

Dalam proses Musrenbang, koordinasi antara pemangku kepentingan menjadi terlembagakan, menciptakan konsensus, dan memungkinkan suara warga untuk tercermin dalam kebijakan.

Dalam era Otonomi Daerah, pendekatan *bottom-up* menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang sangat baik bagi masyarakat sampai ke tingkat akar-rumput. Namun demikian, dalam implementasinya, proses *top-down* dan *bottom-up* tidak terpisah secara kaku. Dalam beberapa hal penting, khususnya menyangkut sinkronisasi prioritas daerah, provinsi dan nasional, tetap dibutuhkan pendekatan yang bersifat *top-down*.

Berakhirnya Orde Baru juga membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan dengan desentralisasi, dimulai dengan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan dengan UU No 32 Tahun 2004. Saat ini UU tersebut telah bertransformasi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, setiap daerah harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai isu, karakteristik,

dan kapasitas di wilayahnya, dan kemudian mengimplementasikan perencanaan tersebut. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pemerintahan, termasuk kualitas perencanaan.

Selain itu, setiap daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), seperti diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Dengan demikian, inovasi dalam proses perencanaan menjadi ajang kreativitas pemerintah daerah dalam mewujudkan target-target pembangunan yang progresif dan transformatif sebagai realisasi visi-misi kepala daerah dan indikator kinerja daerah yang harus dicapai dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018, terdapat beberapa daerah yang dinilai berhasil melakukan inovasi proses perencanaan inklusif pembangunannya; suatu proses yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang kreatif dan terukur oleh pemerintah daerah.

Berbagai kreativitas mengantarkan mereka pada penghargaan pembangunan daerah maupun yang terlihat dari hasil-hasil pembangunan yang nyata. Namun, sekali lagi, semua itu harus dilihat sebagai proses, bukan tujuan. Dalam pembangunan, hasil akhir terletak pada proses yang berkelanjutan dalam upaya kemajuan pembangunan manusia. Indikator dari komitmen politik yang kuat terlihat dalam proses tersebut.

Dalam tingkat provinsi, Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Bali telah berbagi pengetahuan atau *knowledge sharing* perencanaan inklusif yang dapat diimplementasikan melalui capaian-capaian pembangunan di daerah lain.

Hal itu juga terjadi pada beberapa daerah di tingkat kabupaten seperti Kabupaten Tegal, Lombok Utara dan Banyuwangi. Pada tingkat pemerintahan kota, terdapat tiga (3) daerah yang dinilai memiliki perencanaan dan pencapaian terbaik, yaitu Kota Palu, Kota Palembang dan Kota Surakarta.

A. Pelibatan Multi Stakeholders

Dalam aspek perencanaan, visi RPJP 2025 **Provinsi Jawa Timur** adalah sebagai pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan. Provinsi ini merupakan wilayah terluas di antara

empat (4) provinsi, satu (1) daerah istimewa dan satu(1) daerah khusus di Pulau Jawa, dengan luas 47.922 km persegi, dan jumlah penduduk 42.030.633 jiwa (sensus 2017), terbanyak kedua setelah Jawa Barat.

Musrenbang di Jawa Timur merupakan musrenbang terbesar di Indonesia yang melibatkan banyak *stakeholders* yaitu 510.000 peserta melalui tahap berjenjang pada 8.506 Musrenbang desa, 657 Musrenbang kecamatan dan 38 Musrenbang kabupaten/kota menuju Musrenbang provinsi.

Pendekatan *top down* dilakukan melalui Rapat Kerja (Raker) Gubernur dan Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam bentuk sinkronisasi pendalaman usulan kabupaten/kota, sinergitas antar sektor antar wilayah dan derivasi prioritas nasional ke daerah. Proses *top down* mewajibkan kepala daerah hadir secara pribadi dan tidak membawa staf untuk melakukan presentasi di depan Gubernur.

Dalam pendekatan politis, pokok pikiran yang disampaikan DPRD Jawa Timur selaras dengan prioritas program RKP dan RKPD sehingga secara substansi tidak ada perbedaan signifikan.

Yang menarik, CSR terlibat dalam Musrenbangprov di Jawa Timur, dengan konsep Musren CSR, dimana 30 perusahaan berpartisipasi aktif dalam forum CSR pada *desk* pramusrenbang 2017 sebagai solusi pendanaan pembangunan non APBN/D. Forum itu juga mempertemukan *stakeholder* perusahaan dengan urgensi kebutuhan pembangunan di pemerintah kabupaten/kota.

Forum tersebut menjembatani pertemuan dan diskusi *stakeholder* perusahaan, untuk mendalami rencana program dan kegiatan pembangunan di pemerintah kabupaten/kota. Sebagai catatan, ruang komunikasi antara swasta dan pemerintah ini sangat positif untuk kolaborasi membangun daerah sesuai kebutuhan masyarakat dan modalitas yang dimiliki baik pemerintah maupun swasta.

Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan momentum untuk kemajuan daerah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dengan tema yang sesuai dengan visi Gubernur, yaitu “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju, dan Berdaya Saing Internasional”.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui empat (4) misi, yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memantapkan stabilitas daerah, meningkatkan pemerataan yang berkeadilan, meningkatkan





Gambar: Diskusi Dampak Asian Games 2018 antara Komisi XI DPR RI, Bappenas, BI, dan Bappeda Sumsel di Palembang

pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana.

Untuk memastikan perumusan RKPD yang baik, Sumatera Selatan melakukan kontrol terhadap beberapa aspek. Aspek tersebut diantaranya keterkaitan antar dokumen perencanaan, seperti keterkaitan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan RKP, serta dukungan program prioritas daerah terhadap prioritas nasional. Proses perumusan perencanaan telah menerapkan pendekatan THIS agar anggaran, lokasi dan pelaksanaan terpetakan dengan jelas.

Tahapan perumusan perencanaan tahunan di Sumatera Selatan sudah mengacu pada tahap yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, meliputi proses *top-down* melalui sinergi pusat dan daerah dalam forum *stakeholders*.

Sumatera Selatan terlihat jeli dalam memanfaatkan momentum pelaksanaan Asian Games 2018 yang disesuaikan dengan visi Gubernur untuk berdaya saing internasional. Asian Games membuka peluang Sumatera Selatan untuk membangun fasilitas infrastruktur dengan kualitas internasional seperti sarana jalan dan *Light Rapid Transportation* (LRT), permukiman atlet, dan pusat olahraga yang



Gambar: Palembang dan Jakarta sebagai Kota Lokasi penyelenggaraan Asian Games 2018

12

megah.

Fasilitas ini selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk berlatih, menjadikan olahraga sebagai kebiasaan hidup yang sehat, dan menyusun agenda olahraga tingkat nasional, regional, bahkan dunia.

Selain itu, penyelenggaraan Asian Games juga mendidik masyarakat dengan memperkenalkan nilai-nilai global seperti lebih menghargai sesama, menjunjung sportivitas, bersaing secara sehat, dan berprestasi global. Sebelum semaju sekarang, Beijing memanfaatkan momentum Olimpiade tahun 2008 untuk memajukan kotanya.

Di luar manfaat yang dapat dioptimalkan, tantangan pasca Asian Games adalah bagaimana Pemerintah Provinsi dan Kota mampu mengupayakan pendanaan untuk kegiatan olahraga yang disukai sekaligus memberi pemasukan atau pendapatan, serta kegiatan pemeliharaan sarana/prasarana yang dilakukan secara reguler.

B. Menyerap Aspirasi Masyarakat untuk Perencanaan

Provinsi Bali menjangking masukan proses perencanaan pembangunan didaerahnya melalui Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), simakrama atau dialog, serta *teleconference* yang dilakukan secara rutin. PB3AS bermanfaat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, usulan, saran, kritik dan lain-lain untuk kemajuan pembangunan di Bali.

Bali yang dikenal sebagai tujuan wisata dunia itu mengklaim bahwa tidak banyak pemerintahan yang berani membuat acara demokrasi langsung seperti ini. Acara tersebut hanya ada satu di Indonesia, bahkan di dunia. Hanya ada satu acara lain yang mirip, yakni di Hyde Park, London.

Praktik PB3AS ini menarik untuk dipelajari, karena proses *public hearing* ini selain bersifat *bottom-up approach*, juga sebagai media untuk antisipasi penolakan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan pembangunan. Ketika masyarakat dilibatkan sejak dari proses perencanaan, mereka juga belajar bertanggungjawab terhadap keputusan bersama, selain juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.

Pendekatan *top-down* dalam inovasi diwujudkan dengan menurunkan Prioritas Nasional ke dalam 10 Prioritas Daerah untuk menjawab sembilan (9) isu strategis daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui rapat koordinasi dan evaluasi program dengan melibatkan BPS dan Bank Indonesia. Pendekatan politik dilakukan untuk menjangking pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik, forum SKPD, dan Musrenbang RKPD.

Secara substansial, dokumen perencanaan **Provinsi Bali** mengacu pada RPJMN dan RKP, khususnya dalam merumuskan prioritas daerah dan isu strategis. Selain itu, dalam perencanaannya Bali menggunakan prinsip *one island, one plan*, dan *one management* sebagai kesatuan daerah yang terintegrasi dalam suatu sistem perencanaan pembangunan yang mengarah kepada *pro growth, pro job, pro poor, pro culture*, dan *pro environment*.

Kabupaten Tegal menyusun RKPD berdasarkan proses *top-down* dan *bottom-up*. Penentuan prioritas daerah dilakukann secara *top-down* berupa sinergi dengan kebijakan provinsi dan nasional. Adapun proses *bottom-up* melibatkan masyarakat untuk mengikuti musrenbang desa dilanjutkan dengan menyusun pagu indikatif di setiap kecamatan. Dengan diberlakukannya pagu indikatif tersebut,

OPD akan mengalokasikan dana pembangunan sesuai karakteristik kewilayahannya.

Konsep THIS juga diterapkan dalam perencanaan pembangunan **Kabupaten Lombok Utara**. Seperti di beberapa kabupaten lain, proses perencanaan pembangunan di kabupaten ini mengambil usulan berdasarkan pendekatan *top down*, melalui program daerah yang mengacu kepada prioritas nasional. Pendekatan *bottom-up* dilakukan untuk menjaring usulan masyarakat, tokoh adat dan ulama, serta usulan dari sisi politis yang berupa pokok pikiran usulan dari DPRD.

Hal menarik di kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat yang terletak di kaki utara Gunung Rinjani itu adalah adanya musrenbang khusus perempuan dan anak. Inovasi dalam proses perencanaan itu dimaksudkan untuk menangkap usulan atau aspirasi dari perempuan dan anak, khususnya membahas mengenai isu pendidikan dan kesehatan. Musrenbang khusus itu menjadi salah satu upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak.

Modal utama pembangunan **Kabupaten Banyuwangi** adalah kuatnya kepemimpinan kepala daerah dan bertumpu pada aparat daerah sebagai motor penggerak, tidak sektoral dan *cair*. Tata kelola pemerintah yang baik diterapkan secara luwes melalui transparansi, akuntabilitas, transformasi pada sistem berbasis digital, serta dukungan akademisi dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan pembangunan bersifat inklusif dengan mengutamakan distribusi kegiatan ekonomi yang melibatkan rakyat melalui usaha rakyat dan UMKM lokal.

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah **Kota Palu** melakukan pendekatan THIS berdasarkan kondisi geografi daerah (gunung, bukit, sungai, lembah, teluk), dilengkapi dengan target perencanaan yang terukur.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta menjawab tantangan pembangunan di Kota Palu, Pemerintah Kota Palu melakukan berbagai inovasi, seperti Musrenbang inklusif yang melibatkan kaum transgender, pemulung, dan difabel. Berdasarkan proses itu, sebanyak 55 persen usulan diakomodasi dalam perencanaan.

Pendekatan *top-down* di Kota Palu juga dilakukan dengan mengacu RKP. Perencanaan pendekatan teknokratik dilakukan bersama tim

pendamping dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan program yang rasional, realistis, dan proporsional. Proses ini mewujudkan efisiensi anggaran sebesar Rp 149,8 Miliar. Sementara itu perencanaan dengan pendekatan politis menampung 42,3 persen pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD 2018.

Proses perencanaan kreatif dilakukan oleh Pemerintah **Kota Surakarta**, dalam upaya menyinergikan prioritas pembangunan Kota Surakarta dengan provinsi dan nasional. Selain itu, Informasi anggaran berbasis spasial menunjukkan transparansi dan memberi kemudahan bagi publik untuk memahami dan memanfaatkan informasi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sangat transparan dalam proses perencanaannya yang ditunjukkan dengan semakin banyak pemangku kepentingan dalam proses pengawasan jalannya pemerintahan.

Untuk pendekatan *bottom-up*, fasilitator kelurahan dan tim monitoring-evaluasi (monev) membantu masyarakat dalam proses perencanan pembangunan. Tenaga fasilitator kelurahan (Faskel) dan tim monev pada 51 kelurahan sangat berperan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses *bottom-up* perencanaan pembangunan kota melalui musrenbang kelurahan. Hasil dari proses *bottom-up* ini, bersinergi dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

Hal menarik dalam inovasi proses perencanaan daerah dilakukan oleh **Kota Palembang**. Inovasi penting yang telah dikembangkan adalah efisiensi anggaran melalui Program Gotong Royong serentak di seluruh kota Palembang. Tujuan program ini adalah meningkatkan kesadaran lingkungan dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Program ini berhasil menghemat anggaran Rp 500 juta per minggu untuk pengelolaan dan penanganan kebersihan kota.

Hal penting yang harus dicatat sebagai inovasi adalah pelibatan forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (CSR) dalam pembangunan, terutama terkait pengembangan destinasi wisata baru. Kota Palembang melibatkan pihak swasta melalui CSR dalam proses perencanaan.

Forum CSR membuka ruang untuk koordinasi, fasilitasi, dan sinergi potensi para pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk penataan kawasan kumuh, dana CSR dimanfaatkan untuk mengembangkan kawasan kumuh menjadi destinasi wisata

menarik seperti Kampung Mural Goedang Boencit dan Sekanak Bersolek.

Dua kawasan tersebut pada awalnya merupakan kawasan kumuh dan gelap. Dengan bantuan dana CSR, kawasan tersebut disulap menjadi destinasi wisata menarik.

Forum CSR bertujuan mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi dan masyarakat untuk mengoptimalkan implementasi CSR dalam penyelenggaraan proram-program kesejahteraan sosial.

C. Pemanfaatan Teknologi untuk Optimalisasi Proses Perencanaan

Kreativitas **Provinsi Jawa Timur** dalam menyusun RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik dalam bentuk FGD berjenjang, pelibatan perguruan tinggi dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk menjaga konsistensi usulan program/kegiatan prioritas, digunakan satu sistem portal <http://musrenbang-jatim.net> sebagai aplikasi teknologi unggulan.

Sementara itu, **Provinsi Sumatera Selatan** mengembangkan proses *bottom-up* melalui *e-planning plus* dan memanfaatkan radio, situs web (*website*) Bappeda serta forum konsultasi publik. Untuk mengatasi kendala dan efisiensi proses perencanaan yang bersifat



Gambar: Revitalisasi sungai, Palembang

politik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama lembaga legislatif, menyiasatinya melalui aplikasi e-pokir (pokok-pokok pikiran-elektronik).

Dalam hal inovasi pembangunan **Kabupaten Tegal** telah melakukan berbagai inovasi, misalnya, e-musrenbang dan musrenbang *awards*.

Inovasi program penanggulangan kemiskinan, antara lain dengan Jaminan Hidup (JADUP), yang diberikan kepada warga lanjut usia/jompo, tanpa penghasilan dan bergantung belas kasihan. Selain itu juga ada Jaminan Kesehatan (JAKES), untuk warga miskin yang sakit berat, dan Jaminan Rumah (JARUM), diberikan kepada warga miskin tanpa tempat tinggal, dan Sistem Informasi Masyarakat Miskin (SIMAS).

Inovasi pembangunan dilakukan dengan PBB *Online*, Program Lahir Olah Akta dan Kartu Keluarga (LOAKK), Sistem Kesehatan Ibu dan Anak (SiKIA) dan layanan *call centre* kegawatdaruratan medis (Gagian Nulungi), *Public Safety Center* Kota Tegal di nomer 119 atau 082211555119.

Dalam upaya mempercepat pembangunan, **Kabupaten Lombok Utara** melakukan beberapa inovasi, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi program. Karena kesadaran bahwa penerapan teknologi informasi menjadi kunci dalam pengembangan pemerintahan, yang memberikan kemudahan akses untuk memperoleh data atau informasi mengenai desa.

Di **Kabupaten Banyuwangi**, sistem perencanaan dan pengawasan pemerintahan berbasis teknologi informasi (TI) tidak hanya dilakukan tingkat kabupaten, namun sudah menyentuh pemerintahan desa.

Di Banyuwangi digunakan aplikasi untuk memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di tingkat desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau.

Dalam level kota, perencanaan **Kota Palembang** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah menggunakan *e-planning*. Prioritas pembangunan Kota Palembang dalam RKPd disusun berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan prioritas nasional, prioritas provinsi, tantangan global, permasalahan pembangunan, isu strategis, RPJMD Kota Palembang, dan faktor eksternal serta internal yang dijabarkan ke dalam program/kegiatan.



Kota lain yang memiliki inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi adalah **Kota Surakarta**. Inovasi proses dan program prioritas saling terkait sesuai misi Kota Surakarta. Selain itu digunakan juga aplikasi *Solo Destination*.

D. Perencanaan Pembangunan dan Kearifan Lokal

Cita-cita pembangunan daerah yang berkesinambungan dapat dilihat pada upaya pemerintah daerah bekerja dengan penuh semangat. Selain itu terdapat motto dan simbol-simbol warisan leluhur setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan kearifan lokal antara lain dilakukan oleh **Provinsi Bali**. Provinsi yang merupakan magnet terkuat pariwisata Indonesia itu sudah memasukkan unsur budaya dan kearifan lokal untuk mencapai visi-misi Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Bali Mandara atau *The Great Bali*) yang tertuang dalam visi-misi RPJMD. Selain itu ada konsep Bali yang Sejahtera; Bali yang Sukerta Sekala dan Niskala (bahagia lahir-batin) sebagai akumulasi diperolehnya kemajuan, keamanan dan kedamaian.

Bali Mandara diwujudkan dalam program-program pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, partisipatif dan merata bagi masyarakat Bali yang tersebar pada sembilan (9) kabupaten/kota sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam segala program dan kegiatan, filosofi Tri Hita Karana pada masyarakat Bali digunakan sebagai dasar konsep kebahagiaan manusia. Esensi dari Tri Hita Karana adalah keselarasan atau keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), manusia dengan manusia (Pawongan) dan manusia dengan alam lingkungan (Palemahan).

Berbagai cara untuk mempertahankan kearifan lokal dan identitas daerah juga dilakukan Pemerintah **Kabupaten Banyuwangi** di Jawa Timur. Pemerintah setempat secara tegas dan konsisten menerapkan peraturan. Setiap proposal pembangunan oleh investor wajib dipresentasikan kepada bupati sendiri sehingga pengembangan Kabupaten Banyuwangi dapat terkontrol dengan menjunjung lokalitas.

Kebijakan itu sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Apabila diperhatikan, semua bangunan komersial baru yang diizinkan dibangun, memiliki unsur lokal, apakah dari sisi detail yang menggunakan ukiran atau langgam lokal, kualitas ruang maupun bentuk yang mengadopsi arsitektur tradisional lokal (suku Osing), termasuk penggunaan materialnya. Hal ini mendorong para perajin semakin bergairah menghasilkan berbagai produk, termasuk furnitur, dengan gaya ukiran khas Banyuwangi.

Saat ini, bangunan-bangunan baru itu, khususnya yang menunjang pariwisata hanya boleh dibangun di wilayah yang sudah ditentukan, sehingga memberi ruang yang lebih besar bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan kondisi setempat. Masyarakat terus didorong untuk menjadi pelaku usaha wisata *homestay*, *café*, restoran dan berbagai usaha lainnya dengan bantuan pelatihan dari pemerintah. Dengan demikian, kemajuan dan pengembangan Kabupaten Banyuwangi dapat berbanding lurus dengan kesejahteraan hidup masyarakat setempat.

Selain Provinsi Bali dan Kabupaten Banyuwangi, **Kota Palu** juga berusaha melihat aspek budaya sebagai pendukung aspek perencanaannya. Demi mendukung visi Kota Palu menjadi kota jasa dan berbudaya, program pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Salah satu program yang mendukung hal tersebut antara lain pengembangan kelurahan inovatif, yang sudah mencapai 16 *cluster* kelurahan dengan produk unggulan masing-masing, seperti Batik Bomba, alat musik tradisional, kerajinan rotan, sampah organik, batu alam, kerajinan limbah kelapa, tali kapal, dan lain-lain.

Gambar: Masjid Apung, Palu



Untuk mewujudkan Kota Palu yang bersih, hijau dan asri (berhias), ada Gerakan Gali Gasa. Gerakan itu menyasar pada pencegahan kerusakan lingkungan, dengan penanaman pohon produktif yaitu pohon kemiri di daerah lembah.

Selain itu, Kota Palu yang juga berpotensi menjadi kota wisata berbasis budaya dan religi, mengembangkan penataan kawasan wisata religi Sis-Aljufri, Mesjid Apung, kawasan Makam Dato Karamah (tokoh syiar Agama Islam pertama di Lembah Palu). Selain itu juga terdapat kawasan makam Raja I Pue Njidi yang menganut Islam berkat Dato Karamah; serta situs sejarah Kota Palu, seperti kawasan makam Pue I Nggari, Raja Maili, dan lain-lain.

Integrasi wisata budaya dengan wisata alam Kota Palu dimasukkan dalam agenda pariwisata nasional yaitu Festival Palu Nomoni.

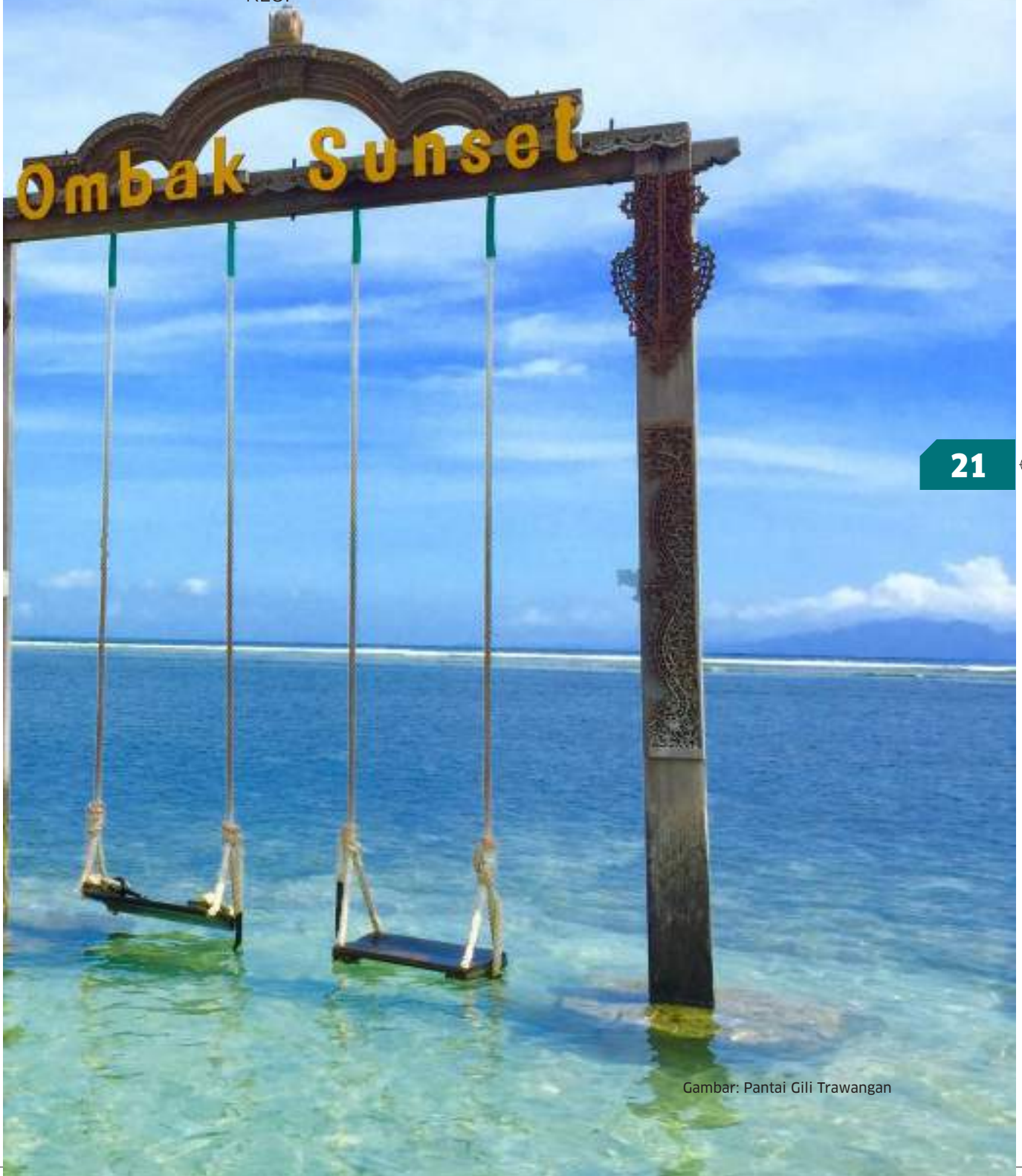
Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki semboyan *Gumi Tioq Tata Tunaq* yang merupakan cerminan kepribadian dan semangat kerja masyarakat Lombok Utara. Kata *Tioq* berarti tumbuh yang bermakna bahwa masyarakat menerima anugerah dari Tuhan sebagai modal dasar yang harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan.

Kata *Tata* berarti atur yang bermakna mengelola kehidupan dan segala sumberdaya yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan bertanggungjawab kepada Tuhan dan generasi mendatang serta untuk membangun kesejahteraan bersama. Kata *Tunaq* berarti menyayangi, memelihara, mendayagunakan secara maksimal yang bermakna tidak menyalahgunakan dan menyalahgunakan seluruh potensi dan sumberdaya.

KLU juga memiliki potensi wisata alam dan budaya yang sangat unik mulai dari destinasi wisata Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno, Gunung Rinjani, hingga Danau Segara Anak. Selain itu, Provinsi NTB umumnya dan KLU khususnya juga terkenal dengan sebutan “Kota Seribu Masjid” karena banyaknya masjid-masjid besar di daerah ini, yang 93 persen penduduknya beragama islam.

Wisata religi menjadi salah satu daya tarik selain wisata alam yang terkenal di KLU. Banyak keunikan di Lombok Utara yang tidak ditemukan di bagian dunia manapun sehingga layak mendorong kabupaten ini sebagai destinasi wisata dunia. KLU merupakan wilayah dengan toleransi sosial budaya yang tinggi, dan tingkat kriminalitas terendah di Provinsi NTB.

KLU juga mengadakan kegiatan tahunan *Gendu Rasa Siu Ate Sopoq Angen*” yang merupakan ikon KLU untuk wadah dalam perencanaan pembangunan dengan memperhatikan identitas dan citra budaya KLU. ***





BAB III

PELAYANAN PUBLIK



Gambar: Mall Pelayanan Publik, Banyuwangi

I think there's no higher calling in terms of a career than public service, which is a chance to make a difference in people's lives and improve the world.

(Jack Lew)

Pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan modern untuk menjamin berbagai ketentuan yang bersifat universal dan terkait dengan jaminan atas hak warganegara.

Public servant yang sering diterjemahkan sebagai pegawai negeri, dapat diartikan pelayan publik atau masyarakat. Dengan demikian, semangat melayani masyarakat dengan baik, semestinya sudah dipahami pada saat seseorang melamar sebagai pegawai negeri.

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi bagi setiap warga negara dan penduduk. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan.

Pelayanan publik meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, kependudukan dan catatan sipil, pertanahan, pendirian bangunan, tenaga kerja, kepolisian, listrik, pajak, dan lainnya.

Pelayanan publik biasanya dikaitkan dengan pengurusan dokumen dan perizinan yang berbelit dan menyita waktu. Bahkan sering terdengar satire mengenai susahny mengurus perizinan, kalau bisa dipersulit mengapa musti dipermudah. Belum lagi petugas yang memberikan pelayanan, biasanya terkesan tidak simpatik dan lamban.



Namun stigma tersebut bisa dihapus. Majunya teknologi informasi dan komunikasi, membuat kepala daerah yang dipilih secara langsung, mau tidak mau harus lebih terbuka dan memperbaiki sistem pelayanan publik di daerah masing-masing.

Apabila kualitas pelayanan buruk, publik dengan mudah akan mengunggahnya ke media sosial dan dengan cepat menyebar. Reaksi publik itu berpotensi mempengaruhi penilaian atas kinerja lembaga tersebut, bahkan membawa konsekuensi pada kinerja kepala daerah.

Semua Tingkat

Pelayanan publik diselenggarakan pada tingkat tertinggi sampai tingkat terendah dari struktur kewilayahan di Indonesia, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau tingkat desa, dan lainnya.

Pelayanan publik menjadi tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Namun harus diakui, UU itu tampaknya masih belum cukup, meskipun yang terpenting adalah implementasinya. Kebutuhan pada pelayanan publik yang lebih baik berbanding lurus dengan kualitas kemajuan pembangunan manusia.



Gambar: Mall Pelayanan Publik, Banyuwangi

Sasaran penyelenggaraan pelayanan publik dalam upaya mencapai *World Class Government* pada tahun 2025 (Desain Reformasi Birokrasi, 2014) tak bisa dipandang sebagai pekerjaan biasa. Seperti dikutip dalam pemaparan Dr. Muhammad Imanuddin Sh, MSi, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan), April 2016, peningkatan pelayanan publik saat ini seperti deret hitung bila dibandingkan dengan harapan masyarakat.

Inovasi pelayanan publik merupakan upaya menciptakan lompatan atau prakarsa terobosan dari instansi atau lembaga publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih dekat dengan harapan masyarakat. Inisiatif itu terletak pada kebaruan, yang boleh saja merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbarui dan ditiru dengan cara melakukan replikasi.

Alih pengetahuan dan pelembagaan inovasi publik menjadi tahapan yang harus dilakukan agar inovasi itu dapat mendorong percepatan dan berkelanjutan.

26

Berlomba

Hampir seluruh daerah berlomba untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayahnya, terutama yang terkait dengan kondisi daerah itu. Setiap kota, kabupaten dan provinsi juga menciptakan istilah-istilah yang unik dan menarik untuk inovasi mereka.

Provinsi Sumatera Selatan misalnya, menciptakan inovasi Gertak Mandiri atau Gerakan Terpadu Serentak Semesta Menuju Rumah Tangga Mandiri. Inovasi tersebut melibatkan seluruh komponen pembangunan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, NGO dan swasta, sebagai gerakan terencana dan sistematis. Gerak bersama, bersatu dan kompak itu merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang berkesinambungan.

Gertak Mandiri diimplementasikan berdasarkan basis data terpadu menjadi rumah tangga yang tangguh secara ekonomi dan sejahtera sosial tanpa tergantung dari pihak lain

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil memboyong banyak penghargaan, salah satu diantaranya *Innovative Government Award* terbaik pertama tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri.

Kabupaten Trenggalek, misalnya, beberapa kali meraih penghargaan, dengan Program “Gelas Memperona Hati” atau Program Gerakan Lansia Sehat untuk Mewujudkan Kesehatan di Hari Tua Nanti, dan Kelompok Kerja Budaya Gencar dari Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan Program “Saber D.O” atau Sapu Bersih *Drop Out*, dan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dasar, termasuk kualitas, sarana, prasarana dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukungnya, meluncurkan program Puskesmas Ramah Anak dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.

KLU juga melakukan pendataan kesehatan dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik melalui pembangunan rumah tak layak huni, membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro, dan pemaksimalan SID (Sistem Informasi Desa) di 33 Desa dan SIK (Sistem Informasi Kabupaten) untuk menunjang pariwisata berbasis masyarakat menjadi salah satu kegiatan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya.

Sampai bulan Juli 2018, Lombok Utara, kabupaten pemekaran tahun 2008 atau satu dari 10 kabupaten di NTB itu memiliki 30 Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Polindes, 49 unit, Puskesmas 8 unit dan satu unit RSUD untuk 214.392 orang penduduk (BPS, 2016).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikenal sangat kreatif, terus menciptakan inovasi publik yang baru untuk mengejar tuntutan kebutuhan masyarakatnya memiliki berbagai inovasi. Di antaranya, Kabinet Arabika (Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika dan Simpadu PMI atau Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Buruh Migran. Selain itu, Pemprov Jawa Tmur juga mempunyai berbagai inovasi di bidang investasi, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain.

Kabupaten Tulungagung dengan inovasi pelayanan publik RSUD dr Iskak, Program Laskar atau Layanan Sindroma Koronaria Akut Terintegrasi, dan membawa Tulungagung menjadi bagian dari Delegasi Indonesia dalam *United Nations Public Service Award* 2018 di Maroko.

Pemkab Lumajang dengan inovasi Blood-Jek Si Pengawal Nyawa. Pemkot Surabaya, dengan pelayanan 6 in 1, meliputi pengurusan akte lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang, dan pindah keluar, secara daring atau *online*, Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujanan, Tak Takut Kepanasan) dari Dinas Sosial, serta inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda.

Di Provinsi Jawa Tengah ada Program *Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*, untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan kematian bayi (AKB), merujuk pada data kesehatan 2013-2018. Program dari hulu sampai hilir, lintas sektoral, lintas program, mulai dari pelayanan primer sampai tersier itu berhasil menurunkan AKI sampai 14 persen sementara target dunia hanya tiga (3) persen.

Di Jawa Tengah, juga ada Layanan “Peluk My Darling” untuk perawatan luka kusta menyeluruh dengan metode *garden healing* yang diciptakan RSUD Kelet Jepara.

Program Si Bina Cantik dari RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo, Purwokerto, merupakan layanan pendaftaran rumah sakit yang disederhanakan dengan *Bridging* Tiga Sistem, yaitu SIM RSMS, BPJS dan INA CBG’S. Sistem itu menyasar pada akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pelayanan JKN secara paripurna dan Penetrasi *Online* atau pengembangan sistem *SMS gateway* menuju registrasi *online*.

Inovasi pelayanan publik yang perlu dicatat adalah Inovasi Kesehatan dan Pengamanan Kebakaran di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Salah satu inovasinya di bidang kesehatan adalah “*mobile ambulans*” – layanan kesehatan 24 jam, dengan mendatangkan ambulans dari Jepang. Kolaborasi dengan pihak dalam dan luar negeri.

Fasilitas ambulans cukup canggih – lengkap dengan alat pacu jantung, infus, oksigen, maupun obat-obatan. Termasuk fasilitas untuk melayani persalinan bagi ibu yang akan melahirkan. Selain ambulans, Bantaeng juga memiliki armada pemadam kebakaran mutakhir bernilai Rp 50 miliar, juga merupakan hibah dari Pemerintah Jepang.

Pemkab Kulonprogo meluncurkan Si Peluru Jamesbon atau Sistem Pelayanan Umum Rujukan Jaminan Kesehatan Sosial Berbasis *Online*. Sistem ini memperbaiki pelayanan pengelolaan Jaminan Kesehatan Sosial dengan daring (*online*), lewat satu pintu.

Kota Tegal mencanangkan “Tegal Melayani” dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan mendekati masyarakat, di area publik. Yogyakarta membangun mall pelayanan publik (MPP).

Inovasi sistem pelayanan publik yang terintegrasi di dalam mall (MPP) menjadi bahan kajian banyak daerah yang ingin mengadopsi sistem yang sama. Kabupaten Banyuwangi selalu sibuk menerima tamu dari berbagai daerah yang ingin mengadopsi berbagai inovasi pelayanan publik dari kabupaten di ujung Jawa Timur itu.

Berikut pemaparan yang lebih rinci mengenai pelayanan publik di Banyuwangi yang menarik untuk dicermati dan dipelajari.



A. Di Banyuwangi, Mall Bukan Tempat Belanja!

Senyum ramah menghiasi bibir gadis cantik yang menyapa pengunjung di pintu masuk Mall Pelayanan Publik, yang lokasinya berseberangan dengan suatu taman yang teduh dan nyaman. Kemudian Duta Pelayanan tersebut menanyakan keperluan pengunjung dan membantu mereka mengetahui tahapan prosedur pelayanan.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar untuk mendapatkan nomor urut. Seperti layaknya pelayanan di kantor Bank Pemerintah maupun Swasta, pengunjung tertib antri menunggu nomor urutnya dipanggil. Mereka duduk di kursi yang berjajar rapi di dalam ruangan berpendingin udara, dilengkapi TV dan air mineral gratis.

Play ground di pojok ruang disediakan untuk pengunjung yang membawa anak-anak mereka. Di sudut lain, disiapkan dua orang tenaga medis untuk memeriksa kondisi kesehatan dasar seperti tekanan darah, kandungan kolesterol dan gula dalam darah, bila pengunjung menghendakinya.

Istilah Mall di Banyuwangi, lebih populer sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mulai beroperasi tanggal 6 Oktober 2017, kenyamanannya sering dibandingkan dengan pusat-pusat perbelanjaan di kota besar.



Gambar: Gadis yang bertugas sebagai Duta Pelayanan, MPP Banyuwangi



Gambar: 173 jenis pelayanan yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik

Pemkab Banyuwangi membatasi ijin pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, baik mall maupun supermarket, karena memilih mengembangkan ekonomi rakyat dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai kegiatan ekonomi di ruang publik.

MPP di kabupaten dengan jumlah penduduk 1,692,324 itu (data Pemkab Banyuwangi, 2017), menerima 300-500 pengunjung setiap hari, antara pukul delapan pagi sampai pukul tiga petang dari Senin sampai Sabtu (sampai pukul 13.00). Di dalam mall itu, sekitar 173 jenis kebutuhan dokumen dilayani secara efektif dan efisien, seperti akte kelahiran, akte kematian, pembuatan KTP, izin berusaha, BPJS, PDAM, perpanjangan SIM, sertifikat tanah, dan lainnya.

Pelayanan publik bidang kesehatan melakukan inovasi melalui Program “Gancang Aron” yaitu Gugus Antisipasi Cegah Antrian Panjang dengan Antar Obat ke Rumah Pasien. Program tersebut dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan sejak tanggal 15 Desember 2017. Program ini bekerjasama dengan pihak swasta Go-jek untuk mengantar obat kepada warga miskin. Sampai bulan Maret 2018, program ini telah melayani 1.700 pasien.

Program inovasi lainnya meliputi “Bayi Lahir Procot Pulang Bawa Akte”, “Stop Angka Kematian Ibu dan Anak (Sakina)”, dan “Pergunakan Jamban Sehat, Rakyat Aman” (Pujasera). Loper koran dan penjual jamu keliling berpartisipasi dalam sosialisasi pentingnya ASI dalam program inovasi “Kembali ke ASI”.

Adapun pelayanan publik tingkat desa dilakukan melalui Program *Smart* Kampung. Program ini memanfaatkan teknologi informasi sebagai wujud peningkatan pelayanan publik. Syarat *Smart* Kampung adalah tersedianya jaringan intranet dan internet melalui fiber optik. Kementerian Komunikasi melalui Pemerintah Daerah mendukung dengan jaringan internet.

Untuk membangun jaringan internet, Desa Tamansari, misalnya, menggunakan Telkom yang didanai dari APBDes sebesar Rp 2.000.000/bulan. Selain digunakan untuk urusan kantor jaringan internet juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum/akses kepada masyarakat.

Smart Kampung

Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi memulai program *Smart* Kampung pada 72 desa termasuk Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Hingga tahun 2017, pembangunan *Smart* Kampung menjadi syarat wajib administratif di seluruh desa Kabupaten Banyuwangi dan dimasukkan sebagai salah satu indikator pembangunan. Lebih jauh, program ini mampu memantau pembangunan infrastruktur di 217 desa Kabupaten Banyuwangi melalui ems.banyuwangikab.go.id

Angka kemiskinan Banyuwangi tahun 2018 adalah 8,79 persen, lebih rendah dari nasional yang mencapai 9,82 persen, namun harus menggunakan strategi khusus untuk mengentaskannya. Menurut informasi Pemerintah Banyuwangi, angka kemiskinan tersebut sebagian merupakan penduduk usia lanjut yang tak mampu lagi bekerja untuk mencukupi hidupnya, apalagi mengubah posisinya untuk menjadi berada di atas garis kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan tidak lagi relevan untuk kasus usia lanjut di atas, apabila solusinya adalah dengan menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan penghasilan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Banyuwangi memberi perhatian kepada mereka melalui Program Rantang Kasih, dengan mengirimkan

makanan sehat dua kali sehari. Sebelum program digulirkan, langkah awal adalah melakukan identifikasi penduduk usia lanjut yang tak mampu lagi bekerja dan tidak memiliki keluarga yang merawatnya.

APBD 2018 mengalokasikan Rp 5 miliar untuk program rantang kasih. Program itu memperkuat semangat masyarakat untuk peduli terhadap situasi di sekelilingnya, khususnya pada para lanjut usia yang miskin dan tidak memiliki keluarga.

Program lain yang juga memperhatikan penduduk usia lanjut adalah bedah rumah. Program ini membidik rumah-rumah tak layak huni, dengan memberi bantuan untuk penyediaan material senilai Rp 10 juta.



Gambar: Balai desa Taman Sari, Banyuwangi

Suatu Pagi di Rumah Mbah Kesi

Pagi itu kami mengunjungi Mbah Kesi di Dusun Krajan, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, diantar oleh Kepala Dusun, Agus Winarno. Mbah Kesi yang usianya diperkirakan lebih dari 80 tahun itu tinggal di sebuah rumah dengan dua ruangan, berlantai tanah, berdinding papan, di atas tanah milik desa.

Sehari-hari dia hanya berbaring di atas *amben* kayu yang sudah reyot karena bagian belakang tubuh tak mampu lagi menopang seluruh tubuh agar bisa duduk. Mbah Kesi sempat menikah, tetapi tidak punya anak.



Saat ini Mbah Kesi hidup bersama cucunya, seorang remaja, yang lebih banyak bermain di luar ketimbang menunggu neneknya. Ibu si cucu adalah keponakan Mbah Kesi yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kota kabupaten yang hanya sesekali pulang untuk menengoknya.

Mbah Kesi adalah lansia dengan kriteria warga miskin yang berhak mendapat kiriman makanan dari Program Rantang Kasih. Kadus Agus mengirim bubur dengan lauknya, dua kali sehari, karena Mbah Kesi tidak bisa lagi mengunyah nasi dengan baik. Pagi itu, dia meminta dikirim roti sebagai ganti bubur. Bosan, katanya.

Mata Mbah Kesi tampak berbinar ketika kami mengunjunginya. Dia memegang erat-erat tangan kami yang mendekat ke ambennya. Ketika kami pamit dia terkesan enggan melepaskan genggamannya, lalu meminta kami mendekat, sebelum matanya kembali menatap kosong ke langit-langit rumah kayu itu.

Kehidupan Mbah Kesi yang sepi dari sentuhan kasih sayang masih terus terbayang ketika kami melangkah keluar rumah. Program Rantang Kasih sungguh sangat membantu, tetapi para lanjut usia mempunyai kebutuhan akan kepedulian yang aktif, lebih dari sekadar mengirim makanan.

Para lanjut usia seperti Mbah Kesi membutuhkan kehangatan dan pendamping untuk menemani, apalagi kalau bersedia melakukan perawatan ala kadarnya, seperti membantu mandi, buang air, mengganti dan mencuci bajunya, serta membersihkan rumah.

Berbagai hasil penelitian meenunjukkan, yang membuat lansia kehilangan gairah hidup bukan ketiadaan makanan, tetapi kesepian dan ketidakpedulian dari orang-orang sekitar.***

B. Link and Match di SMK Provinsi Jawa Tengah

Di tengah derasnya informasi dan data yang menunjukkan bahwa penyumbang angka pengangguran terbesar adalah para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pemprov Jawa Tengah mengembangkan SMK Negeri yang mengupayakan program *link and match* sehingga siswa bisa langsung bekerja begitu lulus.



Gambar: Gerbang SMK Negeri Jawa Tengah

Berbeda dengan SMK Negeri lain yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, SMKN Jateng di bawah kewenangan Pemprov. Salah satu alasan penting didirikannya sekolah tersebut adalah untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Intervensi Pemprov ini berlandaskan pada keyakinan bahwa pendidikan merupakan salah satu solusi untuk mendobrak lingkaran setan kemiskinan.

Satu syarat yang harus dipenuhi calon siswa SMKN Jateng itu adalah berasal dari keluarga miskin. Hal ini dibuktikan dengan KIP/ KPS/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang di keluarkan oleh kelurahan. Syarat itu mengalahkan syarat lainnya seperti prestasi pada tingkat pendidikan sebelumnya.

Setelah lolos proses administrasi, seleksi akademik, seleksi kesehatan, dan penilaian psikologi, tahap selanjutnya kunjungan pihak sekolah ke rumah calon siswa. Kunjungan itu dimaksud untuk membuktikan bahwa anak yang lolos menjadi pelajar SMK Negeri Jateng ini memang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, namun memiliki potensi akademik yang baik.

Karena memang dirancang untuk anak-anak dari keluarga tak mampu, SMK Negeri Jawa Tengah tidak memungut biaya. Semua siswa tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas, seperti seragam, alat tulis, makan tiga kali sehari, pelayanan kesehatan dan lainnya. Selain prestasi akademik, di sekolah itu juga ditekankan pendidikan karakter sehingga siswa diharapkan memiliki mentalitas yang baik seperti disiplin, sopan, jujur, dan peka terhadap lingkungan sekitar.

Sekolah vokasi itu mengembangkan lima jurusan, yaitu, bisnis konstruksi dan properti, elektronika industri, teknik instalasi tenaga listrik, teknik permesinan, dan teknik kendaraan ruang otomotif.

Karena sekolah vokasi memang disiapkan untuk bisa langsung bekerja, maka yang harus dilakukan adalah kerjasama sekolah dengan dunia kerja, dunia usaha serta dunia industri pada umumnya. Untuk itu, Pemprov berprakarsa untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan Jepang sebagai mitra.

Kerjasama itu tak sekadar untuk menampung siswa latihan kerja dan bekerja setelah lulus, tetapi perusahaan-perusahaan mitra itu juga membuat pelatihan atau mendukung penyelenggaraan training untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan ketrampilan yang dibutuhkan di perusahaannya.

Meski demikian, pada dasarnya, lulusan SMK Negeri Jateng diberi kebebasan untuk memilih, ingin bekerja di mana atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai gambaran, untuk tahun 2017, terdapat 74 persen siswa lulusan SMK Negeri Jateng yang bekerja, 20 persen melanjutkan studi, tiga (3) persen berwirausaha, dan tiga (3) persen dalam proses mencari kerja.

Pemprov mengupayakan lulusan SMK Negeri Jateng dapat langsung bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan demikian, keluarga itu dapat dientaskan dari jerat kemiskinan.

Keberlanjutan praktik cerdas di bidang pendidikan ini menghadapi tantangan yang tidak kecil karena biaya operasionalnya berasal dari APBD dan didirikan atas dasar SK Gubernur. Gubernur merupakan jabatan politis, sementara pelayanan pendidikan harus tetap berlanjut.***





BAB IV

PENATAAN PERMUKIMAN



Gambar: Huntara di Semanggi, Kota Surakarta

Housing is a basic human right, enshrined by the United Nations as the right not just to basic shelter but to “adequate housing,” in terms of legal security of tenure; availability of services, materials, facilities, and infrastructure; affordability; habitability; accessibility; and location and cultural adequacy.

(Article 25 of the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights)

Lingkungan

yang nyaman untuk tinggal dan menjalani hidup sehari-hari merupakan idaman masyarakat. Namun dengan berkembangnya suatu wilayah, masuknya pendatang dari luar daerah untuk mencari kerja dan bermukim, kenyamanan menjadi sesuatu yang mewah. Dari tahun ke tahun, harga rumah terus meroket, berbanding terbalik dengan kenaikan pendapatan merambat.

Para ahli perencanaan kota memproyeksikan jumlah penduduk di wilayah urban akan mencapai 50-60 persen dari jumlah penduduk antara tahun 2020-2025. Maka persoalan yang muncul terkait *population density* (kepadatan penduduk) yang berkelindan dengan *carrying capacity* (daya dukung lingkungan), kemampuan memberikan pelayanan dasar dan semua hal yang terkait hal itu. Tak heran kalau pada musim panas terjadi kekeringan dan banjir pada musim penghujan. Kepadatan penduduk di kota-kota besar memicu berbagai persoalan; juga terkait perebutan ruang dan rumitnya memenuhi pelayanan dasar.

Isu Dasar

Sebagai kebutuhan dasar selain pangan dan sandang, papan atau tempat untuk tinggal dan bermukim merupakan isu dasar dari hak asasi manusia. Kompleksitas permasalahan permukiman di kota-kota besar selalu terkait dengan permukiman kumuh dan padat dengan fasilitas umum yang buruk dan lingkungan yang tidak sehat.

Masalah perumahan dan permukiman merupakan isu multidimensi dan lintas sektoral, berhubungan dengan isu kependudukan, infrastruktur, daya dukung lingkungan, kemiskinan dan berbagai persoalan terkait.

Isu kependudukan berkaitan dengan perpindahan penduduk dari satu wilayah yang minim lapangan kerja ke wilayah yang lebih banyak kegiatan ekonomi. Isu infrastruktur menyangkut tidak layak lingkungan dan tempat tinggal beserta seluruh sarana dan prasarannya.

Selanjutnya berkaitan dengan isu kemiskinan. Penduduk yang tinggal di kawasan padat dan kumuh itu sebagian besar hidup dengan pekerjaan serabutan, sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasarnya.

Mereka menempati lahan-lahan kosong yang memudahkan mereka menjalani aktivitas hidup, misalnya di bawah jalan tol, di bantaran sungai, atau di pinggir rel kereta api. Isu berkembang ke ranah pelanggaran hukum dan lingkungan hidup apabila dibiarkan berlarut-larut sehingga tidak mudah ditangani.



Permukiman kumuh dan padat merupakan fenomena yang semakin jelas di kota-kota atau wilayah yang sedang berkembang. Di berbagai wilayah, migrasi ke kota-kota besar semakin tinggi.

Persoalan terbesar kota terkait dengan kepadatan penduduknya adalah krisis akses pada sanitasi dan air bersih, yang melanda berbagai negara di dunia saat ini. Dua hal itu sangat erat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Isu sanitasi dan air bersih itu setidaknya terkandung dalam tiga (3) dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan 6 SDGs adalah memastikan akses air bersih dan sanitasi layak bagi semua. Tujuan 11, mencakup kota dan permukiman manusia yang aman, inklusif, aman dan berkelanjutan. Tujuan 15 adalah melindungi dan memulihkan serta mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat dan hutan secara lestari.

Air bersih dan sanitasi juga merupakan salah satu indikator dalam RPJMN, khususnya pada bagian “Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di pasar Internasional.”

Air bersih dan sanitasi sangat berkaitan dengan kualitas hidup dan kesehatan warga. Di kota-kota besar muncul berbagai jenis penyakit dengan turunan baru yang penyebarannya sangat cepat. Selain itu juga penyakit-penyakit ‘kontemporer’, seperti demam berdarah, chikungunya dan sisa penyakit lama yang sulit hilang seperti kaki gajah.

Selain itu juga muncul penyakit-penyakit akibat pencemaran air, udara, limbah padat (sampah), serangga serta binatang pengerat. Isu stunting juga berkaitan dengan akses pada air bersih dan sanitasi.

Data BPS samapai November 2017 menunjukkan, 67,89 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi yang layak, naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang 67,80 persen. Rata-rata nasional rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2017 adalah 72,04 persen, sedikit meningkat dari tahun 2016 yang 71,14 persen. RPJMN menargetkan target 100 persen cakupan air bersih pada tahun 2019.

Berbagai hal dilakukan untuk menyelesaikan persoalan itu. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-Pamsimas), misalnya, merupakan kelembagaan di tingkat desa yang dibentuk masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS), mulai dari perencanaan, implementasi, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan SPAMS.

Program SPAMS dimulai tahun 2008, saat ini menghasilkan lebih dari 16.000 KP-SPAMS di tingkat desa, tersebar pada lebih 365 kabupaten/kota dari 33 provinsi di Indonesia.

Meski demikian, harus diakui masih rendahnya akses, kualitas fasilitas, dan terutama, perilaku hidup sehat masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih. Selain itu juga rendahnya rasa memiliki dan pemahaman tentang pentingnya air bersih dan sanitasi dalam kehidupan sejak janin berada dalam kandungan.

Mengembalikan Martabat

Berbagai kota saat ini terus berusaha menata kawasan padat dan kumuh secara komprehensif, dengan berpegang pada situasi geografis wilayahnya dan pemahaman mendalam akan pentingnya hal itu bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Namun yang lebih penting dari seluruh upaya itu adalah upaya mengubah mindset berbagai pihak, bahwa penataan kawasan kumuh tidak hanya menyangkut sesuatu yang sifatnya hanya permukaan atau kosmetik, tetapi terutama adalah mengembalikan martabat manusianya.

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2017, menunjukkan luas permukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.641 hektar (Tempo.co, 5/09/17). Pemerintah optimistik, Indonesia akan bebas kawasan kumuh pada tahun 2019, meski pun berdasarkan data Kementerian PUPR, sampai saat ini masih terdapat 8,1 persen dari 38.641 hektar kawasan kumuh yang belum tertangani. (Media Indonesia, 6/10/18).

Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya mengalokasikan dana Rp 600 Miliar untuk 30 kabupaten/kota yang menyatakan komitmennya untuk melakukan percepatan penanganan permukiman kumuh. (Detikfinance, 5/09/17). Sedangkan Pemerintah DIY telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 Miliar untuk mengurangi kawasan kumuh pada tahun anggaran 2017-2018. (Tempo.co 6/03/17).

Banyak daerah tak memiliki dana cukup untuk mengurus kawasan kumuh di wilayahnya. Kabupaten Sidoarjo, misalnya, menyimpan 301 hektar kawasan kumuh, baru 77 hektar di antaranya yang bisa ditangani. Tahun 2017, Pemkab mengucurkan Rp 3,4 miliar untuk mengurus kawasan kumuh, tetapi tahun 2018 tidak ada anggaran untuk itu. (Jawa Pos, 21/04/18).

Meski demikian, ada banyak kota dan kabupaten yang secara serius menangani masalah itu. Pemerintah Kota Ambon, misalnya, selain melalui Program *Slum Improvement Action Plan* yang juga merupakan program kolaborasi, juga melalui Program Padat Karya Tunai Kota tanpa Kumuh (Kotaku) menerbitkan SK Walikota Ambon untuk menanganan kawasan kumuh di 15 desa/kelurahan pada dua kecamatan tahun 2015.

Program itu merupakan program kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan warga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya. Program Kotaku tak hanya membangun infrastruktur lingkungan, tetapi juga meningkatkan ekonomi warga dan membangun perilaku hidup sehat masyarakat. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 11,28 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai.

Kota Ambon merupakan salah satu kota yang berhasil mengurangi wilayah kawasan kumuh dari tahun ke tahun. Tahun 2014, luas kawasan kumuh mencapai 101,64 hektar, berkurang menjadi 87,64 hektar (2015), lalu turun lagi menjadi 65,21 hektar tahun 2016 dan 43,05 hektar tahun 2017 dan ditargetkan menjadi 22 hektar tahun 2018. Kota Ambon optimis mencapai target 0 persen kawasan kumuh tahun 2019.



Gambar: Pemukiman Kumuh di Kota Ambon

Cara berbeda dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Selain membangun rusunawa, Pemkot juga memilih revitalisasi kawasan dengan lebih dulu melakukan jajak pendapat dengan masyarakat setempat. Setiap kawasan memiliki tema, misalnya, Kawasan Wajib Belajar, Kawasan Bebas Rokok dan lain-lain.

Berikut contoh praktik cerdas penataan kota secara komprehensif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah.

A. Solo tidak Hanya Bengawan Solo

Nama Bengawan Solo diabadikan dalam sebuah lagu merdu. Popularitasnya bahkan menyeberang sampai ke Jepang. Namun untuk kegiatan cerdas yang dibahas dalam buku ini, bukan hanya Sungai Bengawan Solo yang bermata air di sekitar Wonogiri, namun juga Kali Pepe yang bermata air di sekitar Boyolali, serta sungai lainnya. Wonogiri di sebelah selatan, dan Boyolali di wilayah barat, merupakan wilayah tetangga Solo atau Surakarta.

Sejak zaman dahulu kala, Surakarta menjadi pusat perdagangan untuk wilayah Karesidenan yang meliputi 7 wilayah yaitu Surakarta, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Hasil bumi yang dihasilkan oleh enam (6) wilayah tetangga tersebut diangkut ke Surakarta, untuk dipasarkan ke wilayah-wilayah lain yang lebih jauh. Pasar Legi merupakan Pasar Induk yang mendistribusikan hasil pertanian seperti beras, jagung, cabai, kentang dan lainnya, dari wilayah Karesidenan.

Selain itu, Surakarta sudah terkenal dengan industri kain termasuk batik. Sampai sekarang, Surakarta masih dikenal dengan produksi batik yang handal, juga produksi kain termasuk yang terbesar di Indonesia.

Pabrik kain dan batik seperti Batik Keris, Sritex, Tyfonteks, Danar Hadi, dan lainnya menghidupkan perindustrian di Surakarta. Pasar Klewer merupakan pasar batik dan tekstil yang besar dengan omset puluhan milyar rupiah per hari.

Dengan perdagangan dan perindustrian yang maju, kegiatan ekonomi ini mampu menyedot pendatang sekitar karesidenan untuk bekerja dan mencari pekerjaan di Surakarta. Kegiatan industri dan kepadatan penduduk menyebabkan semakin mahalnya harga tanah dan rumah, sehingga memicu pendudukan lahan kosong seperti bantaran sungai.



Kondisi ini lambat laun menyebabkan menyempitnya badan sungai, meningkatkan risiko banjir, dan memburuknya lingkungan dan air sungai. Apabila sebelumnya penduduk memanfaatkan air sungai untuk air minum, mandi, dan mencuci, maka saat ini sungai masih digunakan untuk membuang limbah rumah tangga.

Lebih parah lagi, apabila industri juga membuang limbah ke sungai tanpa melalui proses netralisasi. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk memindahkan penduduk dari tepi sungai dan revitalisasi sungai.

1. Rumah Deret

Untuk memindahkan penduduk dari tepi sungai, Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan beberapa program seperti Rumah Deret, Rumah Susun, dan Hunian Sementara. Selain itu Pemerintah Kota juga berupaya menumbuhkan rasa kepemilikan dan menyadarkan perbaikan perilaku yang lebih sehat.



Gambar: Kampung Deret di Kelurahan Keprabon, Surakarta

Rumah Deret berupa rumah-rumah tapak yang dibangun berderet di tepi sungai, sebagai perbaikan dari rumah-rumah sebelumnya yang tidak teratur dalam komposisi dan bentuk bangunan, serta fasilitas sanitasi dan air bersih.

Tanah milik Pemkot yang dibangun sebagai Rumah Deret ini disediakan untuk disewa, terutama bagi penduduk yang telah lama tinggal secara tidak resmi. Pemkot berkepentingan untuk menciptakan lingkungan dan kondisi sungai yang sehat, sementara penduduk juga terakomodasi kebutuhan tempat tinggal dengan diberikan hak pakai melalui sewa rumah deret yang relatif murah.

Contohnya Rumah Deret di Kelurahan Keprabon. Penduduk tepi Kali Pepe yang menempati bantaran sungai tidak digusur menjauh dari sungai. Pemkot menata dengan mengubah rumah mereka yang semula membelakangi sungai, menjadi menghadap ke sungai. Antara sungai dan rumah diberi jarak sekitar tiga (3) meter untuk jalan inspeksi dan ruang publik.

Pada saat posisi sungai di belakang rumah, maka sungai menjadi wadah besar untuk semua limbah rumah tangga. Hal itu berdampak serius pada kondisi lingkungan. Buangan limbah di sungai menciptakan polusi air dan udara, yang berakibat buruk untuk kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Kalau sungai berada di depan rumah, masyarakat diharapkan dapat menjaga kebersihan sungai. Dengan demikian, lingkungan terjaga dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sehat.

2. Rumah Susun Sewa

Rumah susun sewa dibangun vertikal seperti halnya apartemen sederhana yang tingginya maksimum empat tingkat. Besarnya jumlah penduduk yang harus dipindahkan, menjadi alasan logis Rusunawa yang dibangun.



Gambar: Rusunawa Keprabon, Surakarta

Rusunawa dibangun antara lain untuk mensiasati mahalanya harga tanah di Surakarta. Sama seperti Rumah Deret, Pemkot mewajibkan penghuni membayar sewa supaya masyarakat menghargai pembangunan Rusunawa. Selain itu kewajiban membayar sewa mendorong masyarakat untuk bekerja mencari nafkah, sehingga tidak tergantung kepada Pemerintah.

Sewa Rusunawa Rp 100 per hari untuk lantai dasar, Rp 75 untuk lantai dua dan Rp 50 untuk lantai tiga. Meskipun sewanya tampak murah, tetapi masih banyak penghuni menunggu, tidak mampu membayarnya.

Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota untuk mendorong masyarakat penyewa agar lebih bersemangat bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga bisa memenuhi tanggungjawabnya membayar uang sewa bulanan.

3. Hunian Sementara

Pemukiman kembali merupakan konsekuensi kegiatan pembangunan yang mensyaratkan pemindahan penduduk ke lokasi lain. Namun dalam beberapa kasus, lokasi untuk menampung penduduk yang dipindahkan itu belum tersedia, sementara pembangunan harus segera dimulai.

Untuk menyiasati masalah tersebut, Pemkot Surakarta membangun kompleks hunian sementara (Huntara) di Semanggi dengan kapasitas huni untuk sekitar 400 KK. Penduduk dapat segera dipindahkan kalau sudah pemukiman yang baru sudah siap.

Upaya-upaya Pemkot Surakarta dalam menyikapi pemukiman kembali ini mampu meredam aksi-aksi kontra produktif seperti penolakan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas infrastruktur atau sengketa lahan. Pendekatan persuasif dilakukan melalui banyak pertemuan dan diskusi.



Gambar: Huntara Semanggi, Surakarta

Sejauh ini pendekatan persuasif diikuti penyediaan tempat tinggal layak untuk penduduk yang harus dipindahkan, menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Surakarta.

4. Revitalisasi Sungai

Surakarta terletak di wilayah serupa lembah dengan Gunung Lawu di sebelah timur, Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah barat, serta terusan dari Pegunungan Kidul di sebelah selatan. Mungkin kondisi geografis tersebut yang menyebabkan sungai yang mengalir di Surakarta tidak hanya Bengawan Solo.

Wilayah tersebut menjadi pertemuan beberapa sungai antara lain Kali Pepe, Kali Gajah Putih, Kali Anyar, Kali Premulung, dan Sungai Bengawan Solo. Program pengendalian banjir di Solo mulai dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir sejak 2016. Badan sungai Kali Pepe yang berhulu di Boyolali, setelah direvitalisasi menjadi 60 meter dari 20 meter sebelumnya.

Revitalisasi Kali Pepe bertujuan untuk mencegah banjir. Penanganan Kali Pepe Hulu dapat mengurangi risiko banjir di Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres. Sementara di daerah hilir, mengurangi risiko genangan banjir di Kecamatan Banjarsari, Pasar Kliwon, dan Laweyan. Selain untuk pencegahan banjir, revitalisasi Kali Pepe melalui pembangunan Bendung Karet Tirtonadi untuk mengembangkan wisata air.



Gambar: Revitalisasi Kali Pepe, Surakarta



Gambar: Skema Penanganan Banjir Terintegrasi, Surakarta

Proses pemindahan penduduk dari tepi Kali Pepe yang dilakukan Pemkot Surakarta menarik untuk disimak. Pendekatan persuasif dilakukan melalui pembentukan pokja-pokja yang dikoordinasikan oleh Lurah di wilayah kelurahan yang dilintasi Kali Pepe.

Setiap keluarga yang dipindahkan mendapatkan ganti sesuai dengan yang disepakati dan ditetapkan. Pemkot memberikan ruang diskusi dengan penduduk untuk pindah di wilayah yang dikehendaki.

Dengan uang penggantian dari Pemkot, penduduk bisa memilih tetap tinggal di Surakarta, dengan membeli tanah atau rumah yang telah ditetapkan kriteria minimal-nya. Apabila menginginkan tanah dan rumah untuk tinggal yang lebih luas, bisa memilih di sekitar Surakarta yaitu di Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, atau Boyolali, dan lainnya.

Bentuk kerjasama Pemkot Surakarta dan penduduk bantaran sungai dalam mewujudkan yang terbaik untuk penduduk dan Kota Surakarta ini bersifat positif dan konstruktif.

Memang musyawarah dalam pokja membutuhkan waktu yang tidak singkat, dan tidak selalu berjalan lancar, karena moral hazard atau niat tidak baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi kadang muncul misalnya dengan memalsukan data dan informasi penting terkait. Namun kesungguhan Pemkot dan kerjasama penduduk demi kebaikan bersama dapat mengatasi permasalahan yang muncul.

Hasil revitalisasi sungai di Surakarta telah kelihatan melalui lingkungan tepi sungai yang mulai tertata. Selanjutnya muncul tantangan bagaimana memelihara lingkungan sungai supaya banjir tidak lagi menghampiri, dan kesan kumuh berganti dengan kebersihan dan ketertiban seperti saat revitalisasi selesai.

Dua tantangan yang harus dijaga antara lain perilaku penduduk agar lebih menghargai kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, dengan tidak menjadikan ruang publik sebagai tempat berdagang pedagang kaki lima. Tantangan kedua adalah pengawasan dari Pemkot yang secara reguler memantau dan memelihara lingkungan sungai.

Proses mendidik dan mengingatkan masyarakat untuk mencintai lingkungan bersih dan mengutamakan kepentingan umum perlu upaya terus menerus tanpa kenal lelah. Risiko apabila hal tersebut tidak dilakukan antara lain lingkungan kumuh dapat terjadi lagi, dan lebih menyedihkan fasilitas yang telah disediakan dengan kerja keras akan rusak dan mangkrak.

B. Keasrian Tukad Bindu Denpasar

Pemberdayaan masyarakat merupakan satu cara mendorong masyarakat dengan kesadaran dan keinginan sendiri berupaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tugas pemerintah adalah memberi bantuan atau fasilitas sehingga upaya masyarakat menghasilkan manfaat yang mereka nikmati bersama.



Gambar: Revitalisasi Sungai, Denpasar

Sungai yang bersih dan tidak bau adalah indikator permukiman yang sehat. Upaya menciptakan lingkungan sungai yang sehat tidak lagi sekedar mimpi, paling tidak Kota Denpasar bisa mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Nampak jelas di lokasi Tukad Bindu bahwa pemberdayaan masyarakat berhasil menjadikan wilayah sekitar sungai bersih dan nyaman untuk dikunjungi.

Tukad atau sungai Bindu semula adalah sungai yang kotor, dipenuhi sampah dan lumpur. Setelah dibersihkan dan dikelola secara serius, tempat itu menjadi destinasi wisata di kota Denpasar dengan berbagai kelengkapannya seperti wisata air, area fitness, yoga, *jogging track* yang menyenangkan bagi warga kota.

Untuk menghidupkan wilayah di sekitar sungai dikembangkan kegiatan ekonomi seperti pertanian sederhana dan usaha kecil. Masyarakat menanam sayuran dan membuka warung sehingga memungkinkan pengunjung berwisata kuliner.

Obyek wisata air Tukad Bindu di Banjar Ujung, Desa Kesiman, Denpasar Timur itu melengkapi Tukad Badung yang konon disejajarkan dengan Sungai Cheonggyecheon di Seoul, Korea Selatan. Revitalisasi Tukad Bindu merupakan salah satu dari lima sungai yang divitalisasi Pemkot Denpasar untuk mengembalikan fungsi sungai.

Revitalisasi kawasan ini bisa dikatakan berhasil sehingga sering dikunjungi para pejabat dan delegasi luar negeri, termasuk Delegasi IMF-World Bank saat pertemuan tahunan badan dunia itu di Bali, bulan Oktober 2018.

Revitalisasi Tukad Bindu merupakan proyek inovatif berbasis pemberdayaan komunitas. Pada prasasti di pintu masuk Tukad Bindu, terbaca bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dibantu Bank dunia, berperan membantu pemberdayaan masyarakat di lokasi tersebut antara tahun 2014-2015.

Bantuan hibah itu memberikan stimulan untuk kegiatan yang lebih besar, termasuk sebagai jalan memperbaiki sanitasi dan lingkungan, dengan melibatkan seluruh masyarakat Kesiman. Upaya itu membuahkan hasil. Bantaran sungai yang semula tempat pembuangan sampah yang kumuh dan angker, menjadi lingkungan sungai bersih dan sehat.



Gambar: Gerbang Tukad Bindu, Denpasar

Keberlanjutan kegiatan di Tukad Bindu terlihat dengan semakin baiknya kondisi wilayah sungai meskipun bantuan PNPM sudah lama berakhir. Menurut informasi, Pemkot Denpasar melanjutkan pengembangan dan penataan kawasan itu melalui program replikasi Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) selama dua tahun. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1,5 Miliar setiap tahun untuk tiga Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). Masing BKM mendapat Rp 500 Miliar.

Upaya pemberdayaan masyarakat bukan hal yang mudah dilakukan, apalagi untuk mengubah pola pikir atau mindset masyarakat agar mencintai kebersihan dan memelihara lingkungan. Keberhasilan membalik keadaan di Tukad Bindu penting untuk ditularkan ke masyarakat komunitas sungai lainnya.

Beberapa daerah lain, seperti Kota Palembang, juga tertarik mengadopsi konsep revitalisasi sungai berbasis masyarakat dengan melakukan kunjungan belajar pada Pemkot Denpasar.

Revitalisasi Tukad Bindu tak bisa dilepaskan dari komitmen walikota dan wakil walikota. Pada tahun 2017, Tukad Bindu meraih penghargaan Kali Bersih Terbaik Tingkat Nasional dari Direktorat Jendral Sumber Air Bersih Kementerian PUPR yang diterima oleh Komunitas Kali Bersih Tukad Bindu ***

Gambar: Penataan Tukad Bindu, Denpasar



BAB V

PARIWISATA



Gambar: Ritual Adat Desa Glagah, Banyuwangi

Tourism is the biggest industry in the world.
(Martin Parr)

Sektor Perjalanan dan Pariwisata (*Travel dan Tourism, T&T*) diyakini sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar yang menciptakan pekerjaan, mendorong ekspor dan menciptakan kemakmuran di seluruh dunia.

Setelah perkembangannya selama lebih 25 tahun, Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan tahun 2017 sebagai Tahun Internasional Pariwisata Berkelanjutan untuk Pembangunan. Keputusan PBB itu membuka kesempatan lebih besar untuk mengungkap lebih jauh nilai ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan warisan yang terkandung dalam sektor ini.

Selama lebih dari 25 tahun, World Travel & Tourism Council (WTTC) melakukan penelitian tentang dampak ekonomi dan lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor T&T. Laporan Ekonomi Tahunan 2017, yang mencakup 185 negara dan 26 wilayah di dunia, memaparkan data penting dari kinerja tahun 2016 dan prakiraan 10 tahun ke depan yang unik tentang potensi sektor ini. Meskipun guncangan yang terus meningkat dan tidak terduga dari serangan teroris dan ketidakstabilan politik, pandemi penyakit dan bencana alam, Laporan WTTC Travel&Tourism: Economic Impact 2018 World (2018), menunjukkan, sektor T&T terus menunjukkan ketahanannya pada tahun 2016, dengan kontribusi pertumbuhan PDB langsung sebesar 3,1 persen dan mendukung enam (6) juta tambahan pekerjaan di sektor ini.

Secara total, T&T menghasilkan 7,6 triliun Dollar AS atau 10,2 persen dari GDP global dan 292 juta pekerjaan pada tahun 2016, atau setara dengan satu (1) dari 10 pekerjaan dalam ekonomi global. Sektor ini menyumbang 6,6 persen dari total ekspor global dan hampir 30 persen dari total ekspor di sektor jasa global.

Laporan yang sama tahun 2018 menunjukkan, sumbangan 10,4 persen pada GDP dunia berasal dari sektor T&T, satu (1) dari 10 pekerjaan dalam ekonomi global atau 9,9 persen dari lapangan kerja global, seperlima dari jaringan kerja global diciptakan oleh sektor T&T dalam 10 tahun terakhir.

Kalau pada tahun 2017 tercatat pendapatan dunia 1.494,2 miliar Dollar AS dari wisatawan, tahun 2018 diharapkan bertumbuh 3,9 persen, sektor T&T dunia diharapkan menjaring 1.395.660.000 kedatangan wisatawan internasional. Pada tahun 2028, jumlah itu diperkirakan mencapai 2.094.210.000 dengan pendapatan 2.311,4 miliar Dollar AS atau dengan kenaikan 4,1 persen per tahun.

Dampak Positif

Pertumbuhan sektor T&T dunia itu membawa dampak positif pada pariwisata Indonesia. Melalui *branding* “Wonderful Indonesia”, peringkat daya saing pariwisata Indonesia meningkat tajam dari peringkat 70 tahun 2013 menjadi peringkat 42 pada Travel and Tourism Competitiveness Index 2017 World Economic Forum (WEF). Namun, dalam Laporan The Global Competitiveness Report 2017-2018 WEF, Indonesia berada pada peringkat 41.

Pariwisata memiliki keunggulan karena sebagian besar kegiatannya berada di sektor jasa, sehingga mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat, sampai yang terbawah dan tersebar merata. Menteri Pariwisata Arief Yahya meyakini, sektor T&T di Indonesia mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial dalam waktu relatif cepat. Dia juga optimis sektor T&T dapat menjadi *core economy* Indonesia ke depan.

Dalam jumpa pers akhir tahun 2017 (21/12/17), Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pertumbuhan pariwisata Indonesia melesat jauh sebesar 24 persen, hampir empat kali pertumbuhan pariwisata regional yang 6,4 persen pada tahun 2017. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi 20 tertinggi pertumbuhan pariwisata dunia.

Sektor T&T juga diandalkan sebagai penopang perolehan devisa tahun 2019, yang diharapkan mencapai 20 Miliar Dollar AS, dengan target 20 juta wisatawan dan pendapatan 20 Miliar Dollar AS, atau sekitar Rp 300 Triliun (kurs Rp 15.000), naik dari sekitar 17 Miliar Dollar AS dari perkiraan tahun 2018.

Tak bisa diabaikan juga ceruk pasar wisata domestik (wisnus, wisatawan Nusantara), yang jumlahnya sangat besar dan berpengaruh terhadap posisi pariwisata Indonesia di dunia. Jumlah wisnus terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tahun 2019, sumbangan PDB dari sektor pariwisata diproyeksikan sebesar 15 persen. Dengan grafik kinerja yang kontras dibandingkan sektor unggulan lain, seperti minyak, gas, batu bara dan kelapa sawit, sektor pariwisata berada di peringkat kedua setelah kelapa sawit (crude palm oil, CPO).

Sektor T&T bahkan berpotensi berada di peringkat teratas dalam waktu dekat kalau terus menerus dilakukan pembenahan di berbagai sektor pendukung, termasuk sumberdaya manusianya, di samping terus mengeksplorasi kreativitas setiap daerah sehingga menampilkan keunggulan yang khas.

Generasi Milenial

Di Indonesia, pengembangan pariwisata membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh para pihak terkait. Saat mengharapkan daerahnya menjadi menarik untuk dikunjungi para wisatawan, maka pemerintah daerah bersama masyarakat bahu membahu mewujudkan harapan tersebut.

Ceruk wisatawan sangat besar baik domestik maupun luar negeri. Untuk wisatawan domestik terimbas bonus demografi yang sedang terjadi, yakni kondisi usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia tanggungan dalam masyarakat.

Dengan kata lain, meningkatnya jumlah kelas menengah dan gaya hidup Generasi Milenial yang lebih banyak memperhatikan kebutuhan akan *leisure* atau rekreasi, mendorong konsumsi pariwisata. *Leisure* sangat dibutuhkan untuk menjaga kewarasan di tengah hiruk-pikuk persoalan, khususnya tuntutan kompetisi yang semakin ketat dalam dunia kerja.

Generasi milenial, khususnya generasi Y yang saat ini berusia antara 21-37 tahun (2018) dan generasi Z serta generasi *post millennial* lainnya adalah pemilik masa depan. Karena sifat pekerjaannya dan *mode of work*, antara lain, membentuk kembali tempat kerja dan menciptakan pekerjaan, mereka bisa bekerja sambil bepergian ke tempat-tempat menarik.

Dengan demikian, generasi ini dapat mengambil peran dalam upaya-upaya melestarikan budaya. Apabila Generasi Milenial ini tak peduli, maka pelan-pelan budaya sebagai jati diri bangsa akan pudar, kemudian hilang.

Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi milenial memiliki sarana dan prasarana teknologi yang dibutuhkan untuk berbagi pengalaman saat melakukan perjalanan. Jiwa petualangan kaum muda membuat mereka banyak mengunjungi daerah tujuan wisata yang belum dieksplorasi.

Semua pengalaman setelah mengunjungi tempat-tempat yang unik, dengan keindahan panorama dan suasana yang sangat berbeda dengan keseharian mereka itu disampaikan ke publik untuk dibagikan melalui akun media sosial.

Gambar: Garuda Wisnu Kencana, Denpasar

Tulisan dan foto-foto yang disebarakan melalui berbagai bentuk media sosial ditambah gambar-gambar yang menarik yang dipasang di Instagram itu seperti iklan gratis mengenai tempat atau daerah yang dikunjungi, kemudian direspon oleh komunitas mereka.

Generasi ini pula yang menjadi kunci pelestarian budaya, hingga masih bisa dinikmati beberapa dekade pada masa mendatang.

Destinasi wisata yang mengandalkan budaya sangat bergantung pada upaya pelestariannya. Untuk seni ketoprak atau wayang orang di Jawa Tengah, pusatnya adalah di kota Surakarta dan Yogyakarta. Pemerintah daerah selayaknya memberi perhatian serius supaya terjadi regenerasi pelaku budaya (penari dan penabuh gamelan dan lain-lain), sehingga kelestariannya terjaga.

Meski teknologi informasi seperti Internet dan Youtube dapat menghadirkan pertunjukan tersebut, namun nilai-nilainya hilang. Ketrampilan menari, menyanyikan tembang, menabuh gamelan, tak bisa digantikan teknologi. Orang harus tekun mempelajarinya dan kemudian menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Menonton secara langsung memberi pengalaman sangat berbeda. Makna kisah lebih disalami karena interaksi langsung dengan pemain. Dari interaksi itu penonton membawa pulang nilai-nilai tuntunan yang terkandung dalam tontonan itu.

Masyarakat Bali terkenal dengan ketaatannya dalam mengikuti upacara adat dan ritual keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang teman dari Bali yang bekerja di luar negeri, menyatakan ketidaknyamanannya karena tidak bisa lagi menjalani upacara adat.

Namun perasaan kehilangan tradisi seperti itu bisa padam apabila esensi budaya di dalam dirinya redup. Hal itulah yang terjadi bila generasi milenial tak punya kepedulian terhadap upaya-upaya untuk merawat melestarikan budaya.

Salah satu daerah yang dengan cepat membaca keinginan generasi milenial ini adalah Kota Batu. Walikota Batu, Dewanti Rumpoko, menyadari, untuk menarik pengunjung, Kota Batu harus ramah dan menarik serta menghibur.

Walikota tak jarang terlibat dalam acara budaya, termasuk menyanyikan lagu daerah atau menari Goyang Maumere bersama pengunjung. Selepas waktu kantor, masyarakat Kota Batu dan sekitarnya memanfaatkan Balai Kota bersama untuk Goyang Maumere, tarian dari Nusa Tenggara Timur yang berkembang menjadi tari pergaulan untuk menciptakan suasana gembira.



Gambar: Goyang Maumere di Gedung Pancasila Balai Among Tani, Kota Batu

Balai Kota bukan lagi merupakan tempat formal yang berjarak dengan masyarakat. Universitas Muhammadiyah Malang, misalnya, menggunakan Balai Kota Batu untuk *farewell party* dengan mahasiswa internasional. Mereka menyanyi dan menari bersama.

Goyang Maumere ditarikan bersama-sama oleh pemuda-pemudi dari 30-an negara di Kota Batu. Hal ini menunjukkan generasi milenial merupakan kelompok masyarakat yang sangat cair dan dapat menjadi garda terdepan untuk melestarikan budaya.

Dengan situasi itu, setiap daerah didorong untuk melakukan pembenahan besar-besaran di berbagai bidang yang mendukung pengembangan pariwisata, termasuk khususnya sumberdaya manusia, agar mampu menarik berbagai segmen wisatawan, termasuk kaum milenial.

Daerah juga dicambuk untuk menciptakan atraksi wisata dengan menggali budaya lokal, agar bisa berkompetisi dengan daerah lain. Dalam hal ini, contoh yang menarik adalah upaya Pemkab Banyuwangi yang terus menerus memfasilitasi bangkitnya seluruh potensi budaya masyarakat.

Saat ini, Riau, Bangka Belitung, dan Samarinda adalah beberapa daerah yang mulai melirik pariwisata. Beberapa daerah lain, termasuk Banjarmasin, juga mulai melakukan hal yang sama meskipun sebagian masih mengandalkan sektor pertambangan batubara.

Namun demikian, semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata menyadari potensi dampak negatif pengembangan pariwisata bagi lingkungan dan masyarakat, misalnya dampak terhadap sumber daya air dan hutan. Dengan demikian, beberapa daerah mulai membuat berbagai regulasi untuk memperkecil dampak negatif tersebut.

Belum semua daerah sadar dengan potensi wisata yang dimiliki. Sisi kreatif dan inovasi perlu digugah, selain mengandalkan sisi konvensional seperti eksplorasi kekayaan alam. Semua ini berawal dari *branding*, yang mengemban misi untuk menyampaikan pesan dan citra dari corak pariwisata yang dikehendaki pemerintah daerah dan masyarakat.

Branding

Setiap tempat di dunia layak mendapatkan imaji yang pantas, begitu dikatakan Simon Anholt (2007) terkait Identitas Kompetitif (*Competitive Identity*) mengenai suatu bangsa, kota dan wilayah. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan sintesis manajemen merek dengan diplomasi publik di berbagai bidang, termasuk pariwisata.

Saat ini dunia adalah suatu pasar. Kemajuan pesat globalisasi berarti bahwa setiap negara, kota, wilayah harus berkompetisi satu sama lain untuk merebut pasar dari konsumen dunia.

Setiap daerah memiliki citra tersendiri. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka orang lain, termasuk pasar akan membuat definisinya sendiri dari citra tersebut, sehingga segala sesuatu tentang suatu daerah berada di tangan orang lain, termasuk segala potensi yang dimilikinya. Risiko terburuk dari fenomena ini daerah dapat tergulung oleh opini pasar.

Paris adalah tentang gaya, fashion, Jepang tentang teknologi, Swiss tentang kekayaan dan ketepatan, Rio de Janeiro tentang karnaval dan sepak bola, Tuscany tentang kehidupan yang menyenangkan, dan sebagian negara-negara di Afrika tentang kemiskinan, korupsi, perang, kelaparan dan penyakit.

Pandangan klise atau *stereotype*, baik positif maupun negatif, benar atau salah, pada dasarnya mempengaruhi perilaku orang terhadap suatu tempat, orang dan produk mereka. Mungkin memang tidak adil tetapi demikianlah adanya. Sangat sulit bagi suatu negara, kota, wilayah untuk meminta orang dari belahan tempat yang lain untuk mengubah gambarannya mengenai tempat lain dan memahami kerumitannya.

Beberapa negara, kota, tempat, wilayah yang bahkan cukup progresif tidak mendapatkan perhatian pengunjung maupun investor karena reputasinya yang lemah atau negatif, sementara tempat lain mendapatkan citra yang mengesankan selama berpuluh tahun, bahkan sejak berabad-abad lalu.

Sebagai gambaran umum, misalnya Amerika Serikat memiliki kota-kota yang populer dengan *branding* masing-masing. Washington DC misalnya, dikenal sebagai “rumah” bagi museum kelas dunia.

New York menjadi pusat bisnis dunia dengan berkibarnya pasar saham di Wall Street, Los Angeles begitu dikenal sebagai pusat produksi film Hollywood sebagai *global pop culture*. Hawaii identik dengan tempat tetirah untuk sejenak meninggalkan kesibukan sehari-hari untuk menikmati pantai, tarian, dan lainnya.

Pemerintah Jepang saat ini membangun langkah-langkah untuk memikat wisatawan melakukan perjalanan melalui rute tradisional dari *Golden Route* atau Rute Emas, dimulai dari Tokyo, Gunung Fuji, kemudian ke Selatan ke wilayah Kansai, yang merupakan “rumah” bagi Kyoto, pusat budaya tradisional Jepang.

Turki yang merupakan satu dari enam tujuan wisata favorit dunia menyambut 100 tahun negerinya dengan rencana strategis di bidang pariwisata. Selain Istanbul yang melegenda, berbagai daerah di negeri dengan kekayaan budaya yang luar biasa itu memiliki *branding* yang kuat sehingga menjadi daerah tujuan wisatawan dunia.

Peru identik dengan Machu Picchu. Kamboja identik dengan Angkor Wat, Hanoi identik dengan Kota Seribu Danau, Praha dikenal sebagai kota Seratus Menara, dan lain-lain.

Branding kurang lebih diartikan sebagai promosi sebuah produk atau jasa dengan identifikasi tertentu. *Branding* dirasa penting untuk memperkuat kesan dan pesan dari suatu produk atau jasa, dan juga menumbuhkan komitmen kepada para pihak yang bekerjasama untuk memajukannya.

Karena *brand*, suatu daerah tujuan wisata dilirik oleh publik. Untuk meningkatkan reputasi suatu daerah, *branding* harus menjadi fokus



untuk memperkecil kesenjangan antara yang sebenarnya dengan yang dipikirkan pasar.

Branding merupakan penanda atau citra, dan prosesnya berlangsung bahkan ketika tidak merasa melakukannya. Segala hal yang dilakukan dan dipaparkan oleh suatu daerah tujuan wisata akan membangun kesan dunia tentang daerah tersebut.

Cara kerja *branding* kira-kira seperti ini: publik memahami tindakan dan kalimat itu lalu mencatatnya dalam pikiran yang terus menerus tinggal di benak mereka. Satu hal yang menjadi harus selalu menjadi pertanyaan saat membuat *branding* adalah: apa yang bisa disampaikan kepada publik tentang daerah tersebut dan apa keunggulan kompetitif yang disampaikan.

Branding kuat di beberapa daerah

Kendati sektor pariwisata terus meningkat, *branding* Indonesia di pasar pariwisata lebih banyak diwakili oleh Bali. Bahkan banyak sekali pertanyaan konyol, seperti “Which part of Bali is Indonesia?” Padahal hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang bisa ditawarkan.

Dibanding daerah wisata lain di Indonesia, pengelolaan wisata di Bali memang sudah jauh lebih maju dan meliputi berbagai segmen wisatawan. Namun demikian, industri pariwisata Bali mulai menunjukkan indikasi kejenuhan terkait atraksi dan destinasi wisata. Masalah kemacetan dan sampah menambah persoalan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pengembangan 1.488 desa wisata sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian Bali. Atraksi yang disuguhkan di desa wisata selain seni tari adalah kegiatan seperti menanam padi di sawah, memetik kopi di perkebunan, melukis layang-layang, menunggang kuda, dan menganyam.

Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali merupakan salah satu destinasi favorit yang terkenal dengan pemandangan sawah terasering. Desa ini diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tahun 2012. Konsep filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam, dan manusia dengan pencipta) tercermin dalam sistem pertanian tradisional di Jatiluwih ini.

Subak merupakan organisasi yang dimiliki masyarakat petani untuk mengatur sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Artinya bagaimana pembagian air, ketinggian cakangan, waktu penanaman, dan penentuan jenis padi dilakukan secara bersama-sama dan adil yang diiringi dengan ritual peribadatan. Dengan demikian, Subak bukan hanya soal sistem irigasi tradisional namun juga tata kehidupan atau konsep kegotongroyongan rakyat Bali.

Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang subak telah mampu beradaptasi dengan teknologi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi melalui program Pemerintah Bali yaitu Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi).

Kegiatan petani seperti mencangkul, menanam, dan membajak sawah dibalut hangatnya sinar matahari menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung pada pagi dan sore hari. Kontur perbukitan yang sejuk juga menjadi potensi sendiri untuk *sport tourism* seperti mendaki dan bersepeda.

Beras merah yang rendah kadar gula dan tinggi vitamin dan mineralnya menjadi produk pertanian andalan yang dihasilkan oleh desa agraris ini. Untuk mendukung sektor wisata unggulan di Tabanan tersebut sudah banyak dibangun penginapan, warung/rumah makan hingga restoran yang menyajikan masakan khas Bali hasil pertanian Jatiluwih.



Gambar: Terasering, Tabanan, Bali

Provinsi Bali juga melakukan kerjasama di bidang pariwisata dengan luar negeri. Misalnya, sebagai *sister province* dengan Provinsi Hainan, Yunan, dan Sichuan di Tiongkok. Sebagai catatan, wisatawan Tiongkok memberi kontribusi terbesar sekitar 25 persen dari total jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Bali pada tahun 2017.

Selain itu juga dijalin *sister province* dengan Negara Bagian Uttarakhand, India untuk kerjasama di bidang pariwisata dan kebudayaan, *e-government*, penguatan kapasitas sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kesehatan. Di bidang pertanian dan pariwisata, Provinsi Bali menjalin kerjasama dengan Thailand, dimana Provinsi Bali telah banyak melakukan ekspor hasil pertanian organik ke Thailand.

Saat ini berbagai daerah berlomba menciptakan *branding* dan inovasi terhadap keunggulan daerahnya bagi wisatawan, sekaligus ditunjukkan dengan kesejahteraan masyarakatnya.

Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Festival Pesona Palu Nomoni, merupakan salah satu festival yang mengungkap kearifan yang sudah tenggelam sejak ratusan tahun lalu, dibalut dalam atraksi seni pertunjukan dengan nilai-nilai kebudayaan masa lalu yang bernilai arif dan luhur.

Kata Nomoni memiliki arti kata berbunyi atau bergema. Tema ini diusung sebagai *spirit* untuk menggaungkan ragam kebudayaan Etnis Kaili di Lembah Palu kepada dunia.

Beberapa kegiatan dan acara yang dilaksanakan dalam Festival Pesona Palu Nomoni adalah Palu Nomoni Marathon, Lomba Perahu Layar Tradisional, Lomba Renang Lintas Teluk Palu, Palu Nomoni *Gateball Open Tournament*, dan *Fun Bike* Palu Nomoni.

Selain itu terdapat kegiatan dan acara lain seperti Kampung Kaili, yang menjadi salah satu Daya tarik Festival Pesona Palu Nomoni adalah dengan Konsep kembali ke kampung. Konsep ini menggambarkan kearifan Lokal masyarakat Kaili yang kaya dengan Khasanah budayanya, akan membuat pengunjung terkagum-kagum dan betah merasakan atmosfir Kampung Kaili yang di konsep mengusung nilai tradisi dengan menyajikan

Pelayanan Kuliner khas Kaili mengajak pengunjung merasakan aroma khas surabe, Jepa, Tabaro Dange, potu-potu, Putu, biapo, kontokonto, topu-topu, dan dapat terpuaskan merasakan langsung kuliner Kaili yang sudah terkenal, Kaledo, Uvempoi, Palumara, Uta dada, Uta kelo. Pengunjung akan dimanjakan dengan daya rasa dan daya kecap pengunjung melalui sajian Makanan Khas Tanah Kaili, disajikan pada



hamparan Kalampa sepanjang 20 meter di salah satu sudut Pantai Talise dengan suasana tradisonal dan sejuknya angin Teluk Palu.

Dengan itu semua, pengunjung diantarkan untuk kembali kepada ingatan akan tanah tercinta, "*Palu Ngataku-Ngata Kita Mboto*".

Di Kota Palembang, nilai-nilai Islam yang kuat juga dibuktikan oleh kehadiran Museum Al-Qur'an terbesar di dunia, Al-Quran Al-Akbar, sebagai subyek wisata religi. Al-Qur'an tersebut dipahat di permukaan kayu tembesu berwarna coklat berukuran 177 x 140 x 2,5 cm.

Mahakarya ini terdiri dari 630 halaman dilengkapi dengan tajwid serta doa khataman bagi pemula. Pembuatan Al-Qur'an menghabiskan dana kurang lebih Rp 2 Miliar dalam kurun waktu tujuh tahun itu menggunakan 40 kubik kayu atau sekitar 315 buah papan kayu oleh 35 orang pekerja. Sebelum diukir, ayat Al-Qur'an terlebih dahulu ditulis di atas kertas karton yang kemudian dijiplak ke dalam kertas minyak. Setelah dikoreksi, tim pemahat diijinkan untuk memahat di atas kayu.

Mahakarya itu berawal dari keinginan Syofwatillah Mohzaib yang dikenal dengan sebutan Opat ketika menjadi seorang penulis kaligrafi di Masjid Palembang pada tahun 2000. Konon, gagasan pembuatan Al-Qur'an yang mulai dipertimbangkan dan direncanakan pada tahun 2002 setelah Opat mendapatkan mimpi yang memberinya isyarat untuk merealisasikan pembuatan Al-Qur'an tersebut.

Surat awal yang ia tuliskan adalah surat Al-Fatiha yang kemudian dipamerkan di bazar pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1423 H atau 15 Maret 2002 dengan harapan mendapat donatur yang mau mendukung keinginannya dalam membuat mahakarya tersebut.

Sebelum dipamerkan di dalam museum, pada tanggal 14 Mei 2009 karya dipajang di dalam ruang pameran Masjid Agung Palembang selama 3 tahun dengan tujuan agar mendapatkan koreksi dari seluruh umat yang melihatnya. Kemudian pada tahun 2011, Al-Qur'an dianggap sudah layak dipublikasikan dan pada tanggal 30 Januari 2012, karya tersebut diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama seluruh delegasi konferensi parlemen Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Mahakarya asli "Wong Kito" itu, tidak hanya menjadi alternatif tujuan wisata warga lokal, tetapi juga turis dari mancanegara, terutama dari negara-negara Arab, Malaysia dan Thailand, yang berkunjung untuk melihat langsung karya seni yang tiada duanya itu. Wisatawan didampingi pemandu wisata yang menjelaskan sejarah Al-Qur'an tersebut. Di sekitar lokasi juga dijual aneka cinderamata.



Gambar: Museum Al-Qur'an, Palembang

Kota Surakarta yang memiliki semboyan “Berseri”, akronim dari “Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah”, juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang biasa didatangi oleh wisatawan dari kota-kota besar. Biasanya wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta juga akan singgah di Surakarta, atau sebaliknya.

Kota ini dikenal dengan *branding* Solo, *The Spirit of Java*, yang membawa citra Kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa; Sebuah kota yang penuh dengan warisan budaya, di mana tak semua daerah memilikinya. Selain itu Kota Surakarta juga memiliki beberapa julukan, antara lain Kota Batik, Kota Budaya, dan Kota Liwet. Dengan adanya aplikasi Solo Destination dapat membantu menonjolkan *branding* solo agar lebih dikenal baik domestik maupun mancanegara.

Berikut adalah praktik-praktik cerdas dari daerah-daerah yang diharapkan mampu menginspirasi daerah lain untuk bidang pariwisata.

A. Apel Malang, Bukan Apel Batu!

Kota Batu semula merupakan kota administratif di Kabupaten Malang, yang ditetapkan tanggal 6 Maret 1993. Kemudian, kota itu mengalami pemekaran dan menjadi kota otonom, terpisah dari Kabupaten Malang, pada tanggal 17 Oktober, 2001. Bersama Kota Malang dan Kabupaten Malang, Kota Batu saat ini merupakan bagian dari kesatuan Wilayah Metropolitan Malang (Malang Raya).

Ketika masih menyatu dengan Kabupaten Malang, Batu merupakan wilayah penghasil buah apel. Apel Malang sangat terkenal sebagai apel hijau yang segar rasanya dengan daging buah yang padat, berbeda dengan misalnya apel berwarna merah dengan tekstur daging buah yang lebih lunak.

Pada saat Batu menjadi kota otonom, sempat terjadi disorientasi karena apel yang dihasilkan sulit untuk diganti namanya menjadi Apel Batu. Situasi itu mendorong Kepala Daerah untuk mencari alternatif identitas daerah, untuk *branding* Kota Batu yang baru. Pemerintah Batu menyadari *branding* yang dilakukan harus didukung oleh potensi yang dimiliki.

Kota Batu yang terletak antara 800 - 3000 meter di atas permukaan air laut, memiliki keindahan alam dengan gunung-gunung yang menjulang di sekitarnya, seperti Gunung Panderman, Gunung Welirang, dan Gunung Arjuno. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan Kota Batu sebagai daerah dingin dengan suhu berkisar 18-32° C.

Kalau pada zaman penjajahan, Bandung disebut sebagai *Paris van Java* (Paris di Jawa), Bogor dijuluki sebagai *Buitenzorg* (kota yang menenteramkan), maka Batu dengan keelokan alamnya, dijuluki *De Kleine Zwitserland* (Swiss Kecil di Pulau Jawa). Sebagai daerah pertanian,



Kota Batu memang telah dikenal dengan agrowisata. Namun nampaknya agrowisata belum menjadikan pengunjung tinggal lebih lama di Kota Batu. Kehidupan sepertinya hanya berdenyut pagi dan siang hari, sementara saat malam hari sepi dan pengunjung lebih memilih Kota Malang untuk menginap.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batu bertekad menciptakan *branding* sebagai Kota Wisata Batu (KWB). Pemerintah Daerah tanpa kenal lelah menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan *branding* tersebut.

Sebagai KWB, masyarakat harus secara sadar menciptakan kondisi untuk menarik pengunjung dan membuat nyaman. Dengan demikian, wisatawan tidak sekedar singgah, namun juga menginap dan mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Batu. Secara paralel, Pemerintah Kota Batu juga menjalin kerjasama intensif dengan akademisi dan investor untuk bersama-sama membangun dan memajukan Kota Batu.

Branding KWB tampaknya mulai menunjukkan hasil. Kota Batu tidak hanya dikenal dengan agrowisata namun juga dengan produk-produk hasil kolaborasi dengan swasta, Jatipark, yang populer seperti *Batu Night Spectacular*, *Secret Zoo*, Museum Angkut, *Dinopark*, dan lainnya.

Wisatawan berbondong-bondong mengunjungi Kota Batu, tidak cukup sehari dua hari untuk mengeksplorasi tempat-tempat wisata yang ditawarkan. Data dari Dinas Pariwisata Batu menunjukkan, tahun 2017, jumlah wisatawan mencapai 4,7 juta orang dari target 4,2 juta orang.

Jumlah wisatawan terus meningkat dan menempatkan Malang Raya sebagai tujuan wisata favorit, dengan Batu yang memberikan sumbangan signifikan pada perkembangan itu. Wisatawan tidak hanya mengunjungi tempat-tempat wisata, namun juga menghidupkan tempat-tempat penginapan, kuliner, toko cinderamata dan toko oleh-oleh yang dikelola masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan pariwisata di Kota Batu, juga membawa konsekuensi yang penting untuk diantisipasi. Pembukaan lahan untuk pembangunan tempat wisata maupun kedatangan wisatawan dalam jumlah yang banyak, akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan maupun infrastruktur.

Pemerintah Daerah perlu ekstra hati-hati dalam memanfaatkan tata ruang, menjaga lingkungan supaya tetap hijau, memanfaatkan



teknologi dalam mengelola pertanian, menjaga mata air, yang jumlahnya 111, tetapi menurut berbagai informasi semakin berkurang, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan fasilitas infrastruktur.

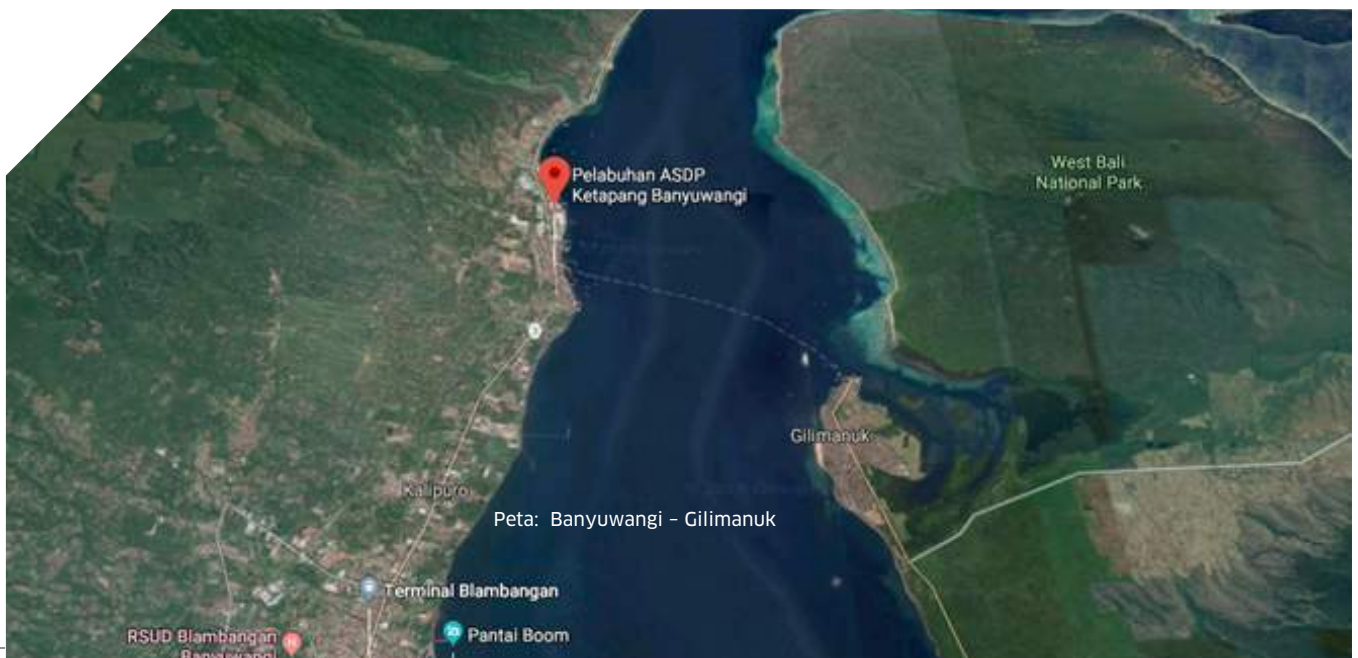
Saat ini Pemerintah Kota menghadapi tuntutan revisi Perda RTRW serta beberapa perda yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat.

B. Banyuwangi, *The Sunrise of Java*

Banyuwangi, seperti halnya banyak daerah di Jawa Timur, menyimpan sejarah kelam dan segudang pengalaman pahit di masa lalu, sehingga wilayah itu untuk waktu yang panjang seperti diabaikan. Apalagi letak geografisnya di ujung timur yang menjadi salah satu pintu masuk tujuan wisata dunia: Bali!

Bupati Banyuwangi Azwar Anas tertawa terkekeh ketika menceritakan bahwa sebelumnya Banyuwangi hanyalah tempat kencing wisatawan, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bali. Pelabuhan Feri di Ketapang, Banyuwangi, hanyalah untuk transit penyeberangan ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

Kehendak untuk mengubah Banyuwangi menjadi tujuan wisatawan, melecut pemerintah daerah berbenah. Banyuwangi harus mampu menahan pengunjung untuk berhenti beberapa hari menikmati keindahan alam dan budayanya yang unik.



Pengalaman adalah guru terbaik. Kerja besar harus dilakukan untuk menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi kabupaten dengan kondisi wilayah beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan, harus digali dan dikembangkan.

Banyuwangi, secara geografis terletak di ujung timur Pulau Jawa merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa, dan lebih luas dari Pulau Bali itu memiliki hutan tertua di Pulau Jawa yakni Alas Purwo, Kawah Ijen, air terjun, pantai yang indah, dan lainnya.

Kabupaten yang terletak di kawasan Tapal Kuda itu dikenal dengan budaya yang kuat. Legenda nama Banyuwangi menyumbangkan narasi sejarah yang menarik untuk dipelajari.

Perjuangan melestarikan Tari Gandrung hingga dicintai Generasi Milenial mampu menciptakan kekaguman tersendiri. Bangunan-bangunan lama tetap dipertahankan, dan dipelihara kebersihan dan kerapihannya.

Taman-taman dipelihara agar masyarakat dapat berinteraksi di ruang publik dengan nyaman. Bangunan baru seperti bandara, dibangun dengan konsep green airport yang ramah lingkungan, dengan perencanaan serius dan artistik agar menjadi bagian dari *branding*, dengan melibatkan arsitek terkemuka di Indonesia.

Suku Osing yang masih setia dengan budaya agraris, merupakan kelompok masyarakat yang sangat menjaga tradisinya. Antara lain, dengan melakukan upacara adat secara turun temurun. Bahkan anak-anak mudanya, meskipun telah meraih gelar sarjana, terus berusaha menjaga kelestarian budayanya.

Pemerintah dan masyarakat Banyuwangi bersinergi membawa Banyuwangi pada kemajuan yang dikehendaki bersama. Kepompong sederhana telah menggeliat dan terbang mengepakkan sayap yang indah menjelma sebagai kupu-kupu. Kerja keras Pemerintah dan masyarakat mendorong metamorfosis Banyuwangi menjadi daerah yang indah dan ramah untuk dikunjungi, tidak sekedar dilewati.

Dalam upaya mengembangkan pariwisata, Banyuwangi melakukan promosi daerah melalui event kreatif secara konsisten bertajuk Festival Banyuwangi. Tahun 2017, digelar 72 kegiatan budaya sepanjang tahun.

Tahun 2018, Banyuwangi meluncurkan Top 77 Calender Event Banyuwangi Indonesia Festival 2018 di Gedung Sapta Pesona

Kementerian Pariwisata Jakarta, 12 di antaranya adalah event internasional. Salah satu dari event nya, yakni Banyuwangi Etno Festival, menjadi bagian dari Top 10 event terbaik di Indonesia.

Tarian Gandrung Sewu yang dalam sejarahnya digunakan sebagai taktik dan strategi melawan penjajahan Belanda, ditetapkan sebagai ikon Banyuwangi sejak tahun 2002, kemudian diangkat sebagai festival budaya dengan tema-tema khusus setiap tahun.

Festival Gandrung Sewu pertama tahun 2012 berhasil menyabet penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai acara dengan pelibatan penari terbanyak. Festival itu tidak saja merupakan pertunjukan tari kolosal dengan orkestrasi klasik, tetapi juga sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan dalam mengapresiasi budaya asli Banyuwangi.

Pelibatan masyarakat dan institusional lokal mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, talent, hingga eksekusi menjadi bukti kegotong royongan yang masih mengakar di Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi juga memecahkan penghargaan MURI tahun 2015 dengan kegiatan menulis secara bersamaan yang diikuti lebih 1.200 siswa dari SD hingga SLTA, di pelataran Candi Moksajati, Desa Kumendung, Kecamatan Muncar. Kegiatan itu merupakan bagian dari serangkaian Gelar Budaya Bumi Blambangan yang diprakarsai Yayasan Eling Nusantara.

Pada tahun 2018 ini Festival Gandrung Sewu yang melibatkan 1173 penari, 64 penampil fragmen dan 65 pemusik itu bertema

Gambar: Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi



“Layar Kemendung” yang menampilkan kisah kepahlawanan Raden Mas Alit, Bupati Banyuwangi yang pertama ketika menantang pendudukan Belanda. Gugurnya Raden Mas Alit menimbulkan kesedihan atau kemendung bagi rakyat Banyuwangi.

Festival yang digelar tanggal 20 Oktober 2018 itu juga menampilkan atraksi baru, berupa 1.000 patung penari gandrung di Pantai Boom.

Geliat bisnis dan pariwisata di Banyuwangi bisa dilihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Banyuwangi yang terus meningkat. Kalau antara tahun 2009-2010, jumlah wisatawan domestik tak lebih dari 500.000 orang, pada tahun 2017-2018 ini meningkat berlipat, menjadi 4,9 juta wisatawan Nusantara. Sedangkan wisatawan mancanegara naik jumlahnya dari sekitar 5.000 orang menjadi lebih 100.000.

Kabupaten Banyuwangi menjelma menjadi surga pariwisata baru di Indonesia dan dunia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2018 salah satu penopang terbesarnya diproyeksikan berasal dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata Banyuwangi diprediksi mampu tumbuh hingga 8,41 persen.

Transformasi Banyuwangi sangat menarik karena tak hanya terkait perubahan di permukaan yang terlihat dari pembangunan dan bentuk fisik, tetapi terutama adalah keberhasilan pemerintah dan semua pihak terkait, bersama masyarakat, menghapus stigma ketertinggalan dan bermetamorfosa bak matahari yang cemerlang menyembul di Timur, *The Sunrise of Java..*



Gandrung Sewu

Isa (18) dan Safira (20) adalah dua remaja dari yang mencintai Tari Gandrung. Keduanya diminta menari saat makan malam di sebuah restoran di kawasan Glagah, Banyuwangi. Mereka langsung membawakan Tarian Gandrung, diiringi instrumen gamelan khas Osing, yang merupakan perpaduan antara Jawa Bali, dengan rebab, kendang, gong, kempul dan kluncing

Ketika ditanya bagaimana spontanitas bisa dibangun, keduanya menjawab, mereka berlatih menari Gandrung sejak usia SD. Bahkan bisa dikatakan tarian itu telah menyatu dalam tubuh dan jiwa mereka.

Di daerah Banyuwangi, Tari Gandrung banyak ditekuni sejak kanak-kanak. Penari Gandrung senior dari Dusun Kedaleman, Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Temu Mesti (sekarang 64), mengisahkan, waktu kecil, dia sakit-sakitan, sulit sekali makan. Orangtuanya lalu membawa dia kepada seorang dukun bernama Mbah Kar untuk disuwuk. Sepulang dari tempat itu, Temu kecil tiba-tiba minta makan.

Ibunya membawanya ke rumah juragan Gandrung bernama Mbah Ti'ah. Di situ Temu makan sangat lahap. Lalu Mbah Ti'ah mengatakan, "Jadikan dia Gandrung kalau sudah besar"

Sejak itu, Temu kecil mulai suka menari. Darah seni sebenarnya mengalir dari garis ayahnya. Sang ayah adalah penari ludruk. Kakeknya ahli mocoan (membaca) lontar. Meski tak mau jadi penari Gandrung, Temu mulai naik pentas pada usia 15 tahun, pada tahun 1969, saat penari Gandrung perempuan berada di puncak kejayaannya, setelah didominasi penari laki-laki sampai tahun awal abad 20. (Maria Hartiningsih, Kompas, 26 Oktober 2007).

Gandrung, menurut Adi Purwadi, tokoh masyarakat Osing dari desa Kemiren, dalam bahasa Banyuwangi setara dengan kasmaran atau tergila-gila karena asmara. Dalam Bahasa Jawa Tengah bisa disamakan dengan "wuyung".

"Gandrung merupakan tarian sebagai wujud rasa syukur setelah panen," ujar Purwadi, yang juga berusaha menghidupkan tradisi mocoan Lontar Yusuf yang mengandung muatan spiritual, dengan melibatkan anak muda di sekitar desa.

Dalam perkembangannya, Tarian Gandung juga mengisi berbagai hajatan desa. Menari Gandrung menjadi selingan mata pencaharian perempuan di desa ketika pekerjaan di sawah tidak memberi hasil yang diharapkan.

Gandrung – satu dari lebih 12 tarian rakyat di daerah Banyuwangi -- adalah tarian rakyat Osing, suku asli di Banyuwangi, yang mempunyai sejarah panjang

terkait perjuangan rakyat. Hasan Basri dalam “Gandrung dan Identitas Daerah” (Desantara, 2008), menulis, gandrung adalah jenis kesenian rakyat yang berfungsi sebagai alat perjuangan melawan Belanda.

Basri menganalisa tulisan sejarawan John Scholte dalam Gandroeng van Banyoewangi (1926), menulis, setelah Perang Puputan Bayu (1771-1772), Rakyat Blambangan yang tersisa, tinggal terpecah ke dalam kelompok-kelompok kecil di pedalaman hutan untuk konsolidasi perjuangan.

Gandrung Banyuwangi muncul bersamaan dengan dibabatnya hutan Tirtagondo atau Tiortaarum untuk membangun ibukota Blambangan yang baru untuk menggantikan Ulu Pangpang, atas prakarsa Mas Alit yang dilantik menjadi bupati tanggal 2 Februari 1774.

Selama lebih 100 tahun, ketika tradisi masih kental, hanya laki-laki yang menari dengan kostum perempuan. Namun kemudian gandrung lanang (laki-laki) diganti gandrung wadon (perempuan) menjelang akhir abad ke 19, karena Islam melarang cross dressing. Gandrung lanang semakin memudar setelah penari terakhirnya, Marsam, meninggal pada tahun 1914.

Sebelum berkembang menjadi kebanggaan daerah, Tari Gandrung dibawakan sebagai wujud rasa syukur masyarakat pedesaan se usai panen.

Upaya melestarikan Tari Gandrung dilakukan melalui Festival Gandrung Sewu yang diselenggarakan setiap tahun sebagai event nasional, ditampilkan secara kolosal di Pantai Boom yang berlatar belakang Selat Bali. Pada Bulan Oktober 2018, tarian kolosal yang mampu menghipnotis ribuan pasang mata itu diikuti sekitar 1.200 penari.

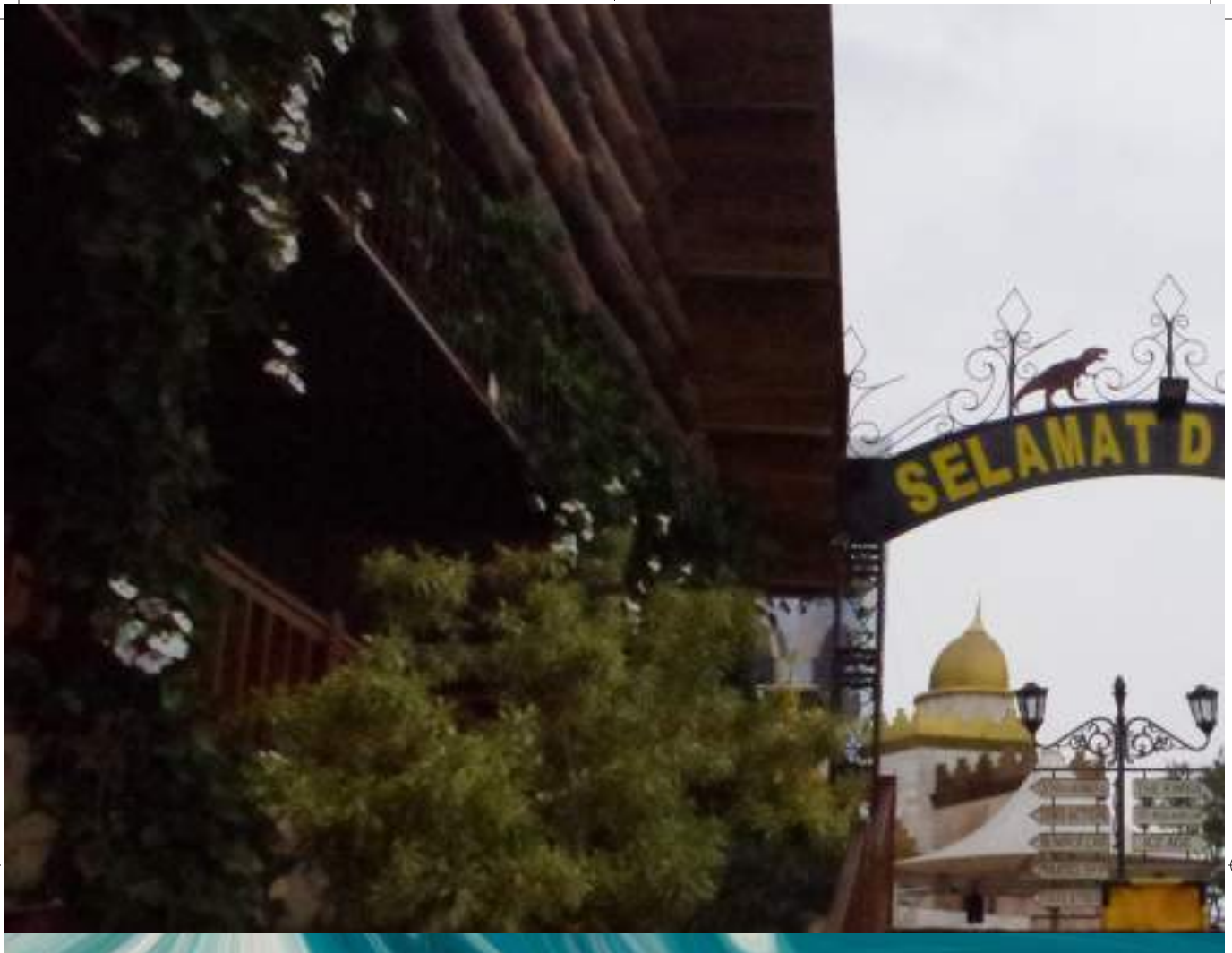
Motor penggerak Festival Gandrung Sewu itu adalah Budianto, budayawan Banyuwangi, pegawai negeri sipil yang berprofesi sebagai dokter hewan. Dia meninggalkan pekerjaan demi kegiatan melestarikan kesenian Gandrung.

Malam itu, Budianto ikut menabuh salah satu instrumen gamelan, yang menghadirkan penari laki-laki mengiringi dua gadis penari. Irama gamelan menghentak, seperti mengajak semua orang ikut menari.

Sungguh, Gandrung Isun, Gandrungono Isun.... ***



Gambar: Para penari festival Gandrung Sewu, Banyuwangi



BAB VI

EKONOMI KREATIF



Gambar: Jatim Park 3, Kota Batu

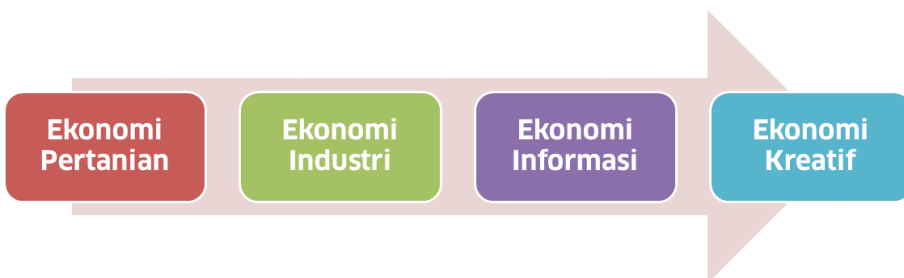
A creative economy is the fuel of magnificence.
(Ralph Waldo Emerson)

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkontribusi besar terhadap peradaban. Internet semula hanya digunakan oleh kalangan terbatas, yakni pekerja kantor dan akademisi. Namun saat ini, internet di *hand phone* telah digunakan luas oleh berbagai kalangan, dari anak-anak sampai orang tua. Internet tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, namun lebih jauh dimanfaatkan untuk berdagang, yakni memasarkan produk secara daring (*on line*).

Kreativitas Generasi Milenial dalam mengoptimalkan internet, tidak berhenti pada *on-line shop*, namun merambah pada penciptaan aplikasi. Kondisi macet di kota besar seperti Jakarta, justru memunculkan ide kreatif. Melihat fakta bahwa tidak semua orang memiliki nyali untuk mengendarai sepeda motor nyelip-nyelip dalam kemacetan, maka diciptakanlah Gojek.

Gojek berkembang dengan *Gofood*, yang menolong orang-orang untuk membeli makanan tanpa harus keluar rumah atau kantor. Yang istimewa adalah bisa memilih menu favorit hanya dengan mengandalkan jari. Turunan Gojek ini berkembang banyak untuk pelayanan-pelayanan yang membutuhkan jasa orang lain.

Globalisasi dan konektivitas telah mengubah cara berkomunikasi, memasarkan produk, dan konsumsi di dunia. Pengetahuan dan kreativitas menjadi aset yang tak ternilai dalam kompetisi dan pengembangan ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep yang menempatkan pengetahuan dan kreativitas sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu ketertarikan berbagai negara untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai model pengembangan ekonomi.



Gambar: Evolusi Struktur Produksi

Ekonomi kreatif disebut sebagai gelombang keempat tahapan pembangunan ekonomi setelah ekonomi pertanian, industri, dan informasi, yang akan menjadi sektor ekonomi yang penting pada masa depan, karena berbasis kreativitas dari orang-orang kreatif yang merupakan sumber daya terbarukan. Ekonomi kreatif menciptakan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.

Ekonomi kreatif menjadi penting dalam pembangunan nasional antara lain karena berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru, berpotensi mendorong majunya pariwisata yang berbasis teknologi dan kreativitas, serta berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Pemerintah Kota Palembang, misalnya, menerapkan mekanisme PPP (*Private Partner Partnership*) dalam memajukan sektor unggulan Palembang yaitu pariwisata, dan sektor lainnya seperti perumahan permukiman, infrastruktur, pangan, dan lain-lain.

Kerjasama dengan kelembagaan pun dilakukan, seperti kerjasama dengan Bekraf untuk mengembangkan pariwisata dengan dana sebesar Rp 10 milyar untuk kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, misalnya bantuan pasar seni, pembinaan pengrajin, seniman, kuliner, dan kriya untuk menghasilkan souvenir yang unik untuk Asian Games 2018.

Dalam mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah Kota Palembang juga akan bekerjasama dengan Mang-Jek, yaitu ojek *online* milik Palembang yang merupakan pesaing ojek *online* yang sudah ada, yaitu Go-Jek dan Grab. Dari pihak Mang-Jek menyatakan siap membantu promosi wisata Palembang melalui mitra pengemudi dan fitur di dalam aplikasi yang khusus akan diciptakan berupa destinasi wisata dan produk lokal khas Palembang.



Gambar: Salah satu Pengemudi Mang-Jek, Palembang

A. Jatimnomic

Pembangunan ekonomi semasa Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (2009-2014, 2014-Februari 2019), mengedepankan Konsep Jatimnomic yang bertujuan ekonomi Jatim tumbuh inklusif dan berkeadilan. Ekonomi yang tumbuh dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang terus menurun, diharapkan bisa mengurangi disparitas atau kesenjangan sosial.

Konsep Jatimnomic merupakan pola dan inovasi Jawa Timur untuk mengoptimalisasi potensi ekonomi dengan mengajak seluruh komponen masyarakat baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/lembaga keuangan dengan mengikutsertakan masyarakat. Keberanian mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang bumihi memberikan dampak positif terhadap kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Jawa Timur.

Jatimnomic menghadirkan kebijakan fiskal yang adil dan tepat untuk melayani dan memfasilitasi ekonomi segmen besar, menengah, maupun kecil. Sebagai cara untuk mengatasi kegagalan liberalisasi, Jatimnomic merupakan trisula strategi pembangunan yang terdiri dari peningkatan basis produksi UMKM dan besar, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan/pasar.

Belajar dari pengalaman saat krisis tahun 1998, UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dengan segala keterbatasannya, lebih mampu bertahan dibandingkan usaha besar. Kenyataan itulah yang menjadi pemikiran untuk mengoptimalkan UMKM sebagai pondasi yang kokoh untuk mendukung perekonomian negara. Untuk mencapainya, dibutuhkan pertumbuhan dan terciptanya lapangan kerja yang tinggi dan berkelanjutan, serta peningkatan pemerataan.

Jatimnomic memperoleh apresiasi nasional karena dinilai menjadi solusi menghadapi ekonomi global. Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan bahwa Jatimnomic adalah konsep pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari “*Indonesia Incorporated*” sebagai sistem ekonomi khas Jawa Timur.

Konsep ini dipandang mampu merespon permasalahan ekonomi di era globalisasi, terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekaligus menuju pertumbuhan ekonomi inklusif. Model itu disampaikan Soekarwo dalam orasi ilmiah saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu ekonomi dari Universitas Airlangga, 22 Agustus 2015.



Gambar: Konsep Jatimnomics

Sebagai penunjang Jatimnomics, diperlukan sejumlah aktivitas ekonomi utama, yakni aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar, aspek pengembangan pasar luar negeri dan dalam negeri, serta aspek pembiayaan yang kompetitif.

Kelebihan lainnya, Jatimnomics juga sangat efektif dalam hal inovasi pelayanan publik. Salah satunya, yakni Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang prosesnya satu pintu dan dipadu dengan pemangkasan rantai birokrasi. Bila ditambah dengan tersedianya surplus ketersediaan listrik dan lahan, bisa dipastikan Jatim menjadi primadona sasaran investor sebagai lokasi penanaman modal.

Produksi sekmen usaha mikro kecil dan menengah meliputi fokus *human development* dengan *dual track strategy*, standarisasi produk dan peningkatan nilai tambah produk. Program *dual track strategy* dilakukan baik pada pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal mencakup MA, SMA dan SMK, sedangkan pendidikan non formal mencakup SMK Mini, Balai Latihan Kerja dan BOSDA Madin. Program ini mampu meningkatkan rata-rata harapan lama sekolah dan angka partisipasi sekolah SMA/SMK.

Produksi usaha besar meliputi *government guarantee*, substitusi impor bahan baku, infrastruktur, sistem upah dengan menyesuaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta harga gas yang ideal, yakni enam (6) sampai tujuh (7) dollar AS per million metric British thermal unit (mmbtu).

Pengembangan pasar luar negeri dengan adanya *senior advisor* dan *exchange center* di negara mitra serta diselenggarakan pameran TTI (*Trade, Tourism dan Investment*). Pengembangan pasar dalam negeri dengan dibuat sistem informasi perdagangan antar provinsi (SIAP), optimalisasi kantor perwakilan dagang dan misi dagang, serta pameran produk unggulan.

Pembiayaan yang kompetitif dengan cara *loan agreement* dan *agro maritime financing*. *Loan agreement* pada industri primer dan sekunder dengan suku bunga 6-9 persen per tahun. *Agro maritime financing* merupakan rekonstruksi pembiayaan dari subsidi ke non subsidi. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Jawa Timur adalah petani, yaitu sebesar 35,15 persen.

Sumbangan sektor pertanian adalah sebesar 13,55 persen dari PDRB Jawa Timur. Saat ini dicanangkan program dana bergilir Hulu-Hilir Agro-Maritim dengan bunga enam (6) persen dengan cara menggeser nilai tambah di pedesaan, sebagai solusi terhadap anomali inflasi dan menurunkan kemiskinan desa. Pengembangan nilai tambah hulu-hilir agro-maritim tercapai pada bertambahnya nilai komoditas padi sebesar 52,49 persen, ikan lele sebesar 93,57 persen dan kopi Arabika sebesar 183 persen melalui peningkatan nilai tambah di pedesaan dengan suku bunga enam (enam) persen dan pagu maksimal Rp 9,6 miliar.

Untuk segmen ekonomi besar, pemerintah daerah memberikan jaminan (*guarantee*) berupa kemudahan perizinan, ketersediaan pasokan listrik, iklim buruh yang demokratis, serta membantu

Gambar: Produk UMKM kota Batu



percepatan ketersediaan lahan untuk kepentingan investasi. Untuk segmen UMKM, salah satunya memberikan stimulus kredit murah dengan metode loan agreement melalui perbankan.

Skemanya, APBD Pemprov dianggarkan kepada Bank Jatim dengan bunga dua (2) persen per tahun. Bank Jatim berperan menjadi APEX Bank bagi BPR-BPR di Jatim dengan suku bunga kredit efektif sebesar enam (6) persen per tahun. BPR kemudian menyalurkan dana kepada UMKM dengan bunga tujuh (7) sampai sembilan (9) persen per tahun. Besaran suku bunga murah lebih kecil dibandingkan suku bunga yang diterapkan bank kepada UMKM yang umumnya yang berkisar 20 persen per tahun. Selain itu, suku bunga murah tersebut sudah termasuk asuransi Jaminan Kredit Daerah atau Jamkrida.

Pemprov Jatim mengembangkan sistem pasar yang mengakselerasi pangsa pasar domestik agar produk asal Jatim diminati oleh pasar. Untuk pasar dalam negeri, 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dikembangkan pada 26 provinsi. Sedangkan untuk pasar luar negeri, telah ditunjuk duta perdagangan pada enam (6) kota pada lima (5) negara. Untuk segmen masyarakat, pendekatan afirmatif diimplementasikan melalui *charity*, dengan hibah dan bansos.

Penerapan Jatimnomics yang dimulai Tahun 2016 berdampak pada pertumbuhan perekonomian Jatim yang relatif stabil meskipun ekonomi global lesu. Perekonomian Jatim tumbuh 5,55 persen pada tahun 2016. Pada triwulan pertama tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,21 persen.

Stabilnya pertumbuhan ekonomi itu ditunjang oleh keuntungan pasar dalam negeri Jatim per Januari-Maret Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 45 triliun atau naik 45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp. 23 triliun. Kelas menengah di Jatim juga meningkat dari 37,22 persen menjadi 38,81 persen. Sektor UMKM pun tumbuh subur dengan jumlah mencapai 6,8 juta dan menyerap banyak tenaga kerja. Jumlah itu meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 4,2 juta.

Pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata penduduk Jatim juga terus meningkat. Tahun 2016 pendapatan per kapita mencapai 3.600 Dollar AS, jauh meningkat dibandingkan 2.100 Dollar AS pada tahun 2009. Tahun 2017 ditutup pada angka 3.968 Dollar AS. Soekarwo optimis tahun 2018 pendapatan per kapita Jawa Timur dapat menembus 4.372 Dollar AS. Secara nasional Pendapatan



Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai 14,61 persen dari PDRB nasional.

B. Tegal, Jepang-nya Indonesia

Kabupaten Tegal terkenal seantero jagad bukan karena wartegnya saja, namun ada yang lain yaitu Industri logamnya. Logam datang ke Tegal pada jaman Penjajahan Belanda dengan adanya pabrik pengolahan Logam.

Pada masa Penjajahan Jepang, Tegal menjadi basis produksi peralatan perang. Program kerja paksa (*Romusha*) memaksa orang Tegal harus menuruti semua perintah dari Jepang. Namun semua itu meninggalkan manfaat tak terduga bagi warga Tegal.

Setelah Indonesia merdeka, Jepang, secara tidak sengaja meninggalkan pengetahuan yang sangat berharga yang ditangkap secara cerdas oleh masyarakat. Sejak itu warga Tegal terus mengembangkan pengetahuan dalam industri logam.

Saat ini sedikitnya 24 jenis industri logam dihasilkan pengrajin Tegal. Misalnya, industri komponen dan suku cadang kendaraan bermotor, alat berat, otomotif, kapal dan kelautan, listrik, kesehatan, senjata angin, aksesoris, perbengkelan, pertanian, perkebunan, bahan bangunan dan rumah tangga, karoseri, pemadam kebakaran hingga peralatan pompa air.

Lingkungan Industri Kecil (LIK) pertama di Jawa Tengah, didirikan di Tegal. Pemerintah mendirikan Lingkungan Industri Kecil talang Cempaka Baru (TAKARU) sebagai pusat informasi logam dan pusat penelitian Logam. Dengan LIK ini membuat pemasaran produk Logam Tegal semakin luas. Benar saja, Logam Tegal diminati perusahaan-perusahaan asal Jepang diantaranya Astra Group yang produknya antara lain Honda, Toyota dan Daihatsu. Jadi, di dalam produk Astra itu terdapat komponen asli buatan Tegal. Hal ini membuktikan bahwa Tegal punya keunggulan yang tidak dapat ditemukan di daerah lain.

“Portal Tegal Jepangnya Indonesia”, Potji.com, di Taman Rakyat Slawi Ayu (TRASA) memunculkan harapan baru bagi masyarakat Tegal. Situs promosi milik Pemkab Tegal itu turut mendorong perubahan besar pada pengelolaan Trasa Mart oleh PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia).

Sebagai pusat kegiatan perekonomian digital, bekerjasama dengan PT Telkom, Trasa Mart Baru dilengkapi dengan *WiFi Corner*



diharapkan menjadi tempat moci para pegiat internet marketing dan terbuka untuk umum.

Pemkab Tegal bekerjasama dengan PT Telkom dan Potji.com membentuk Kampung UKM Digital. Kampung UKM Digital diharapkan menjadi pusat pembelajaran UKM dan pusat penelitian mengandeng Perguruan Tinggi yakni UI, UNDIP dan ITB.

Kerjasama dengan Program Riset Unggulan Nasional dengan Departemen Perindustrian RI diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Tegal sebagai pusat industri permesinan nasional. Program Riset Unggulan Nasional, *Rusnas Engine* -- engine aluminium paduan dua silinder berkapasitas 500 cc hasil pengembangan dari kegiatan Rusnas dan merupakan gasoline pertama buatan lokal -- saat ini sudah dalam tahap komersialisasi, dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap iklim pertumbuhan industri serta mata rantai Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Tegal.

Tradisi minum teh bangsa Jepang juga dimiliki oleh masyarakat Tegal. Kalau tradisi masyarakat Jepang adalah minum teh hijau jenis Sencha, ditemani dengan kue manis atau okashi, masyarakat Tegal lebih suka minum teh hitam yang rasanya sepet, kental, ditemani dengan tahu aci. Rasa sepet berasal dari batang teh yang ikut digiling bersama daun teh.

Di Tegal terdapat empat pabrik teh besar yang menguasai pasar dalam negeri, yaitu Teh 2 Tang, Teh Poci, Teh Tong Tji, dan Teh Gopek.



Gambar: Gerbang Kota Slawi, Kabupaten Tegal

Masyarakat Jepang yang ulet dan pekerja keras mengantarkan Jepang sebagai salah satu negara maju di dunia. Keuletan itu juga dimiliki oleh masyarakat Tegal, yang “menaklukkan” berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, dengan Warung Tegal (Warteg).

Kalau kebiasaan orang Jepang mandi di pemandian air hangat, maka di Tegal ada objek wisata Guci yang menyediakan pemandian air hangat bagi para wisatawan. Konon, mandi di tujuh pancuran guci dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

Kabupaten Tegal memiliki letak posisi dari kaki Gunung Slamet hingga daerah pesisir pantai mirip seperti Jepang dengan Gunung Fuji beserta pantai-pantainya. Daerah pesisir Kabupaten Tegal terkenal akan Pantai Purwahamba, yang menyuguhkan keindahan pantai berombak tenang, pasir hitam yang halus dan udara pantai yang sejuk sepoi-sepoi.

Selain pantai Purwahamba, terdapat pula Pantai Muarareja, Pantai Larangan dan Pantai Randusanga yang mana spot pantai tersebut merupakan spot tersembunyi dari hiruk-pikuknya aktivitas warga pesisir yang sedang menjalankan aktivitas sebagai nelayan.

Apabila daerah pantai menyuguhkan udara yang hangat, lain halnya dengan kawasan di wilayah kaki Gunung Slamet. Wilayah yang berada di sekitar kaki Gunung Slamet merupakan daerah dengan suhu paling rendah di Kabupaten Tegal, yakni antara 13-15°C.

Seluruh situasi itu mendorong kebangkitan ekonomi kreatif di Kabupaten Tegal yang menahan “budaya paten” (saling membunuh) dan buruknya manajemen, sehingga berpotensi menenggelamkan kekuatan Tegal sebagai Jepangnya Indonesia.

C. Bencana dan Harapan Kemajuan

Meskipun Kota Palu menderita gempa, tsunami, dan likuifasi pada bulan September 2018, namun pencapaian pembangunan daerah tahun 2017 menarik untuk dicermati. Diperkirakan kerugian Palu dan sekitarnya akibat bencana tersebut mencapai kisaran Rp 8 triliun. Besarnya kerugian tersebut menunjukkan seriusnya bencana yang menghantam Palu. Diharapkan, Palu dapat segera bangkit dari keterpurukan akibat bencana yang menyerang begitu tiba-tiba.

Pengembangan Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri menjadi salah satu fokus program Pemerintah Kota Palu. Bahkan untuk mendukung

program tersebut, Pemkot Palu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 milyar setiap tahunnya. Inovasi unggulan berbasis IPTEK dengan kategorisasi kelurahan berdasarkan karakteristik daerah sebanyak 18 kelurahan dalam bentuk Insentif Kelurahan Mandiri.

Salah satu program unggulan untuk meningkatkan pelayanan jasa dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan penerapan program Kelurahan Inovasi Unggul. Program kelurahan inovatif dengan produk unggulan merupakan proyek primadona yang diandalkan dalam pembangunan Kota Palu lima tahun mendatang. Penerapan program kelurahan inovasi unggul akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah kelurahan yang ada di Kota Palu.

Sesuai visi misi Kota Palu yaitu mendorong Palu sebagai kota destinasi, untuk itu perlu dorongan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis kelurahan dalam program kelurahan inovasi unggul dan mandiri. Program IKM membutuhkan dukungan penguatan sumber daya manusia, pendampingan teknologi, pendampingan manajemen usaha, dan manajemen pemasaran hingga dipercaya bank untuk meminjam tanpa agunan.

Terdapat 10 produk unggulan IKM Kota Palu tersebut, yakni kerajinan rotan, kerajinan sampah organik, pakan ternak ruminansia, kerajinan olahan bambu, kerajinan limbah kelapa, kerajinan olahan kripik, Kerajinan alat musik tradisional, kerajinan batik bomba dan kerajinan daun silar. Produk unggulan tersebut akan terus dioptimalkan untuk menembus pasar nasional dan internasional.



Gambar: Produk Kerajinan Kota Palu

D. Solo Technopark

Dalam mendorong pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek di wilayah kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta menyadari bahwa sistem iptek yang ada di kota Surakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta bertekad menjadikan Kota Surakarta sebagai kota vokasi dan pusat inovasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tekad itu disusul dengan rencana dibangunnya *Solo Technopark* sebagai pusat pendidikan dan teknologi, pusat riset, pusat pelatihan dan pusat inkubasi produk baru, serta pusat industri dan perdagangan.

Solo Technopark atau yang kemudian dikenal dengan STP adalah sebuah pusat vokasi dan inovasi teknologi di Kota Surakarta, yang dibangun dari sinergi dan hubungan yang kokoh antar dunia pendidikan, bisnis dan pemerintah (Bappeda, 2009).

STP lahir atas kerjasama Pemkot, Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) dan Indonesian German Institute (IGI), merupakan pengembangan dari Surakarta *Competency and Technology Center* (SCTC) yang berdiri tahun 2002. Lembaga diklat ini kemudian menjadi unit kerja dibawah Bappeda Kota Surakarta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota No 900/65/1/2009 tanggal 31 Desember 2009.



Gambar: Solo Technopark, Surakarta

Sebagai sebuah kawasan iptek, STP dibangun untuk memberikan layanan produksi serta pelatihan dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperluas lapangan pekerjaan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Perda No. 6/2007 menetapkan Kawasan Solo *Technopark* seluas 7,15 Hektar, kemudian pada 2013 diusulkan bertambah menjadi sekitar 8 sampai dengan 9 Ha. Solo *Technopark* dapat menjadi kebanggaan Indonesia, apabila semua pihak yang berkepentingan mau bersama-sama mencurahkan sumberdaya untuk mengaktifkan peran dan fungsi masing-masing.

Ada tiga tahap diklat yang harus dilalui peserta di tempat tersebut, yaitu tahap pengetahuan dasar mekanik (*basic mechanic*), tahap program lanjutan (*applied program*) dan magang kerja (*work study*). Masing-masing dari tahapan tersebut memerlukan waktu tiga bulan, dengan total masa diklat sembilan bulan.

Program ini dibagi menjadi tiga, yaitu *applied program mechanic* bertempat di kampus ATMI Solo, *applied program welded* dan *applied program mechanic* garmen di gedung Solo *Technopark*. Selanjutnya peserta menjalani tahap magang kerja industri sebagai persiapan dan menunggu penempatan kerja atau peserta juga bisa mencari tempat kerja sendiri.

E. Terus Berupaya

Beberapa daerah sedang berupaya mengembangkan ekonomi kreatif untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Hal tersebut tercermin dari berbagai data yang mendukung eksistensi UMKM dalam perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis. UMKM berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi untuk PDB.

Daya Saing Perekonomian Daerah Pemerintah Kota Batu bertumpu pada 3 Sektor Unggulan Utama yaitu Pertanian, Pariwisata dan UMKM serta Kemandirian Desa. Dalam rentang 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan ekonomi yang pesat di sektor Pariwisata, UMKM, Konstruksi, Akomodasi Hotel dan Restoran; Investasi





Gambar: Produk oleh-oleh, Kota Batu

Daerah sebesar Rp 3,2 trilyun; APBD sebesar Rp 900 milyar dengan PAD Rp 125 milyar.

Pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Batu meningkat pesat diiringi juga pertumbuhan sektor UMKM dan pertanian. UMKM berkontribusi terhadap PDRB Kota Batu sebesar 86,7 persen.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Batu menunjukkan pertumbuhan cukup pesat. Pada Tahun 2018, tercatat

sebanyak 23.544 UMKM ada di Kota Batu. UMKM tersebut terdiri dari industri pengolahan (1047 UMKM); pertanian (9789 UMKM); perdagangan, termasuk hotel dan restoran (9431 UMKM); jasa transportasi (1004 UMKM); konstruksi (61 UMKM); jasa keuangan (139 UMKM); dan jasa lainnya (1994 UMKM).

Berdasarkan klasifikasi usaha, dominasi usaha mikro mencapai 90 persen (21.396 usaha); usaha kecil 8 persen (1980 usaha) dan selebihnya usaha menengah dan besar. Sektor UMKM di Kota Batu, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 45.477 orang atau 21,35 persen total penduduk Kota Batu.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan pihak Badan Usaha untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan eligibilitas dan kapabilitasnya.

Penguatan UMKM dan IKM dari berbagai hal seperti penguatan kapasitas kelembagaan koperasi, perluasan akses pembiayaan untuk UMKM, pelatihan SDM berbasis kompetensi, fasilitasi pengembangan layanan usaha, perluasan akses pasar, pengembangan sarpras usaha; sertifikasi, standarisasi, merk, dan pengemasan produk; pengembangan desa tematik desa produktif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, misalnya, yang secara empiris terhitung masih muda sedang berusaha mandiri

untuk selalu dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan memanfaatkan peluang dalam mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah KLU secara bergotong-royong membangun kabupaten melalui peningkatan nilai tambah hasil produktif sumberdaya yang dimiliki. Salah satu stimulasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan ruang kreasi yang seluas luasnya bagi masyarakat untuk mengeksplorasi segala sumber daya yang lokal ada dengan memaksimalkan sumberdaya manusia lokal yang kompeten.

Salah satu upaya KLU yaitu dengan bekerjasama dengan Massey University New Zealand dalam bidang pemanfaatan pertanian berbasis holtikultura dengan menyiapkan tenaga pertanian hingga seribu orang hingga pembangunan *pack house* di beberapa titik. Dengan adanya pengembangan ini, diharapkan dapat mengintegrasikan sektor pertanian dengan pariwisata.

KLU juga bekerjasama dengan Pemerintah Haikou China untuk perkebunan khususnya komoditi kelapa sebagai salah satu produk unggulan. Kerjasama juga dilakukan dengan Korea Selatan dibidang listrik LED dan Penerangan Jalan Umum (PJU) berbahan bio solar karena KLU hanya mampu menyediakan pasokan listrik sebesar 3 Mega Watt (MW) sementara kebutuhan masyarakat sebesar 14 MW.

Daerah lain yang menyita banyak perhatian adalah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sebelum tahun 2008, Bantaeng masuk dalam daftar daerah tertinggal di Indonesia. Banjir dan penyakit menjadi masalah besar di kabupaten tersebut mengingat tidak memudahinya infrastruktur dan layanan kesehatan yang tak ideal.

Kabupaten dengan luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Hektar itu memiliki inovasi di sektor pertanian yang tak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hampir semua lahan yang terlihat dari jalan dimanfaatkan untuk pertanian. Perubahan wujud Kabupaten Bantaeng dari daerah tertinggal menjadi daerah maju dan bersih adalah prestasi yang luar biasa.

Beberapa inovasi bidang pertanian yang dilakukan adalah sebagai Kabupaten Penghasil Benih Berbasis Teknologi. Pencetakan benih dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), melalui laboratorium kultur jaringan yang bekerja sama dengan *Southeast Asian Regional Centre For Tropical Biology* (Seameo Biotrop).

Bibit yang dihasilkan dari laboratorium itu tidak terputus dan tak hanya dimanfaatkan oleh petani di Bantaeng, tetapi hampir semua daerah di Sulsel berharap bibit unggul dari penguraian di Bantaeng.

Kabupaten ini juga berinovasi dalam bentuk Gerakan Sistem Tanam Legowo-21 yang telah terbukti mampu meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan khususnya padi di Bantaeng. Dari awalnya 3-4 ton di tahun 2008, kini, dengan mengatur jarak tanam padi dan berbagai teknologi, menjadi 10-12 ton atau meningkat hingga tiga kali lipat. Disisi lain, hama tanaman yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi petani bisa dihindari.

Kabupaten Bantaeng juga mengembangkan Kawasan Agrowisata di Uluere. Kecamatan Uluere yang terletak di perbukitan akhirnya disulap menjadi sesuatu yang keren. Di kawasan ini, buah apapun bisa ditemukan dan seperti tidak mengenal musim. Dengan luas wilayah 60 hektare, Pemkab Bantaeng mengembangkan tanaman apel dan stroberi di kawasan ini.

Di antara kedua tanaman tersebut, diselipkan juga beberapa tanaman lainnya, seperti wortel, bawang merah, dan kentang untuk memanfaatkan lahan yang ada.

Di Bantaeng juga sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selain mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan teknik inseminasi sapi, memanfaatkan limbah



ternak menjadi Biogas di pedesaan, memanfaatkan limbah pangan menjadi sumber pakan ternak, penangkaran talas Bantaeng serta budidaya durian tanpa aroma dan tanpa musim.

Sebagai catatan, buah durian yang dikembangkan di Bantaeng memiliki kadar kolesterol yang rendah. Durian ini juga adalah hasil rekayasa yang dikembangkan dengan teknologi pemupukan sehingga hasilnya lebih baik dari aslinya.

Bantaeng merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan. Dalam angka, selama delapan tahun terakhir, Kabupaten Bantaeng berhasil menurunkan angka kemiskinan yang awalnya 21 persen menjadi 5 persen. Angka pengangguran dari 12 persen, menjadi 2,3 persen. Angka perceraian, berdasarkan data dari pengadilan agama, yang pernah mencapai 155 kasus per tahun, kini jadi tinggal 17 kasus. Tingkat kejahatan, berdasarkan data dari lapas, berkurang drastis. Indikator-indikator itu membuat masyarakat Bantaeng kian bahagia.

Sosok dibalik kemajuan pesat Kabupaten Bantaeng adalah Nurdin Abdullah, seorang profesor bidang agrikultur sekaligus Raja ke-37 Bantaeng yang menjabat sebagai Bupati Bantaeng selama dua periode (2008-2013 dan 2013-2018). ***





BAB VII

SISTEM INFORMASI



Gambar: Penggunaan Sistem Informasi untuk mengolah Big Data

Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don't think anybody can talk meaningfully about one without the talking about the other.

(Bill Gates)

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu.



Informasi merupakan hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih bermakna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Fungsi utama informasi adalah untuk menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi sehingga kualitas informasi sangatlah penting. Kualitas informasi sangat bergantung pada 3 hal yaitu:

1. Informasi harus tepat pada waktunya (*timeliness*)
2. Informasi harus relevan bagi penggunaannya (*relevancy*).
3. Akurasi (*accuracy*)

Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan (atau mendapatkan kembali), memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi

Tujuan dari sistem informasi secara umum adalah sebagai dasar agar organisasi mengerti dan mengetahui sampai manakah kemajuan sebuah organisasi mampu berjalan dalam bidangnya.

Pentingnya sistem informasi dalam organisasi yaitu:

1. Mendorong untuk sadar bahwa data informasi perusahaan dapat dikelola dengan lebih baik.
2. Menghindari kesalahan fatal akibat kelalaian sumber daya manusia.
3. Kemudahan manajemen baik dari segi waktu, kemudahan dan keefektifan.
4. Lebih peka dengan adanya kekeliruan, dan kelengkapan informasi data. Sehingga dengan latar belakang tersebut segala upaya perbaikan dan evaluasi bisa cepat segera dilakukan.
5. Mengendalikan kinerja supaya lebih cepat dengan pendayagunaan waktu yang efektif dan maksimal.

A. Teknologi Informasi

Provinsi Jawa Timur menyusun RKPD Teknokratik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Untuk menjaga konsistensi usulan program/kegiatan prioritas, digunakan satu sistem portal <http://musrenbang-jatim.net> sebagai aplikasi teknologi unggulan.

Sementara itu, Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan proses *bottom-up* melalui *e-planning plus* dan memanfaatkan radio, website Bappeda, serta forum konsultasi publik. Untuk efisiensi proses perencanaan bersama lembaga legislatif, Sumsel mengimplementasikan e-pokir; sedangkan untuk proses teknokratik, menyusun RKPD berbasis *Geographical Information System* (RKPD-GIS). Selain itu, dikembangkan juga sistem informasi penataan ruang (Sitarung), yaitu menggabungkan peta dasar, peta rencana, dan peta tematik.



Gambar: Penyerapan aspirasi melalui radio oleh Pemprov Sumsel

Kabupaten Tegal juga telah memanfaatkan teknologi informasi untuk proses perencanaan seperti menerapkan e-musrenbang, dan perencanaan berbasis spasial yakni usulan-usulan OPD sesuai lokasi yang terpetakan pada aplikasi *Arc GIS*.

Kabupaten Lombok Utara memanfaatkan teknologi informasi untuk proses perencanaan Sistem Informasi Desa (SID) yang telah dioperasikan melalui 33 *website* desa. Adanya *website* setiap desa memberikan kemudahan akses untuk memperoleh data atau informasi mengenai desa. Penerapan teknologi informasi menjadi kunci dalam pengembangan pemerintahan.

Di Kabupaten Banyuwangi, sistem perencanaan dan pengawasan pemerintahan berbasis IT tidak hanya dilakukan tingkat kabupaten, namun sudah menyentuh pemerintahan desa. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lewat penerapan IT dilakukan di berbagai bidang, salah satunya dengan menerapkan sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan (*daring*) alias *online*, yang diberi nama *e-village budgeting*.

Aplikasi ini terdiri atas tiga bagian yaitu perencanaan, tata kelola dan evaluasi yang berbasis *online*. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam SPID juga dilakukan dengan implementasi e-audit secara *real time* dan telah menggunakan sistem akrual terhadap pelaporan keuangan.

Banyuwangi bahkan menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang menyelenggarakan e-audit secara akrual. Banyuwangi juga memanfaatkan IT untuk meningkatkan pelayanan publik melalui program Sistem informasi perijinan *online* (SIPO).

Selain *e-village budgeting*, sejak 2015 Banyuwangi juga menerapkan *e-village monitoring* (e-MS). Sistem ini difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik. Setelah dihitung, terdapat lebih dari 4.000 program di 189 desa yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.

Dalam e-MS, kecamatan akan mengambil foto pelaksanaan program. Misalnya, untuk pembangunan jalan mulai dari 0 persen (kondisi jalan belum diperbaiki) hingga 100 persen (jalan telah selesai diperbaiki). Semua program didokumentasikan dan diunggah di *web*. Program fisik akan dipantau melalui sistem IT yang berbasis fitur Google Map agar bisa diketahui khalayak luas

sekaligus mempermudah kerja pengawas, serta meminimalisasi penyimpangan.

B. Solo Destination

Kota yang memiliki inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi adalah Kota Surakarta. Inovasi proses dan program prioritas saling terkait sesuai misi Kota Surakarta yaitu Aplikasi *Solo Destination* merupakan aplikasi *smart city* yang menaungi banyak informasi kota dan pelayanan publik.

Aplikasi tersebut tidak hanya berisi informasi terkait kuliner, pariwisata, dan transportasi publik, namun juga mencakup pelayanan publik seperti e-pajak dan e-perizinan. Inovasi lain yaitu terkait penataan kawasan kumuh berdasarkan konsep *Land Consolidation* yang tidak hanya memperbaiki bentuk fisik bangunan namun juga melakukan peremajaan wilayah.

Kawasan terdampak akan dibangun saluran drainase, rumah pompa, pompa banjir, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan dilakukan penataan jalan serta setelah bangunan rampung dikerjakan, warga yang menempati tanah negara tersebut akan diberikan hunian dan sertifikat tanah dari pemerintah.



Gambar: Tampilan aplikasi *Solo Destination*

Kemajuan teknologi mengubah persepsi masyarakat akan kemudahan layanan diberagam bidang, termasuk pelayanan umum yang disediakan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Saat ini beberapa teknologi mulai diterapkan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Kota Surakarta bersiap menuju Kota Cerdas (*Smart City*) di tahun 2018. Salah satu upaya persiapan tersebut adalah memperkuat pelayanan publik berbasis informasi teknologi (IT). *Solo Destination* merupakan aplikasi berbasis android untuk mendukung konsep *Solo Smart City* telah diluncurkan pada November 2016.

Peluncuran layanan aplikasi wisata *Solo Destination* ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai kota pertama di Indonesia yang menyediakan layanan pariwisata tersebut. Juru bicara MURI, Wida, mengatakan aplikasi ini pertama kali dan menjadi pelopor bagi daerah di Indonesia.

Solo Destination yang dikembangkan oleh Gamatechno ini adalah sebuah aplikasi terintegrasi yang menyediakan informasi *city guide*, sosial media dan pemantauan lalu lintas berbasis *mobile* yang pertama di Indonesia. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat lokal maupun wisatawan untuk menjelajah Kota Solo dengan berbekal perangkat *smartphone*.

Solo Destination dikembangkan dengan memanfaatkan fitur GPS (*Global Positioning System*) untuk memberikan posisi pemakainya. Aplikasi *Solo Destination* tersedia dalam versi Android dan dapat di unduh di *Google Play Store*. Aplikasi *Solo Destination* memuat informasi hanya dalam satu genggaman.

Solo Destination memandu wisatawan untuk menjelajahi tempat wisata, kuliner, pusat belanja dan cinderamata, hingga informasi hotel. Terdapat fitur pengaduan masyarakat guna mempercepat proses penanganan persoalan, baik mengenai fasilitas umum maupun pelayanan publik. Selain itu, terdapat pula fitur laporan lalu lintas yang memandu masyarakat menghindari simpul kemacetan. Penambahan fitur Radio Anak Konata dan e-Pajak semakin menegaskan pentingnya aplikasi ini khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta.

Kedinamisan aplikasi *Solo Destination* membuka kemungkinan penambahan fitur lain. Pemkot Surakarta terus berupaya mengintegrasikan seluruh layanan pemkot ke dalam satu paket kecil



di *Solo Destination*. Saat ini *Solo Destination* juga menjadi aplikasi dua arah. Tak hanya dari pemerintah daerah ke masyarakat, melalui aplikasi ini masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain.

C. e-Government

Keuntungan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memudahkan manusia dalam mengerjakan tugas yang harus dikerjakan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-government* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan agar lebih baik. Salah satu penerapan teknologi informasi di Pemprov Sumatera Selatan yaitu Sitarung (Sistem Informasi Penataan Ruang), sesuai dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 pada Tahun 2016 (Nomor 11 Tahun 2016).

Sitarung merupakan sistem yang menghimpun seluruh data digital dokumen penting perencanaan berupa perda, buku, album peta dan data-data spasial rencana tata ruang wilayah provinsi serta peta-peta tematik pendukung analisis tata ruang dan peta-peta izin pemanfaatan ruang terkini.

Perencanaan tata ruang yang berkualitas, membutuhkan tujuan, kebijakan, strategi dan muatan yang mampu mengantisipasi isu-isu penataan ruang yang ada, mensinkronkan produk tata ruang dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang yang bersifat komprehensif, baik ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dengan Sitarung diharapkan dapat mendorong pengembangan sistem dan kebijakan satu peta dan penyelenggaraan penataan ruang yang regulatif sistematis guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Early Warning System (EWS) SeiMUSI merupakan salah satu Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pengendalian inflasi. SeiMUSI adalah aplikasi berbasis android yang dikembangkan oleh BI Perwakilan Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendeteksi secara dini gejolak harga di pasar dan diolah secara sistem sehingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dapat segera menetapkan kebijakan yang sesuai untuk mencegah inflasi.

Dalam upaya mengatasi pengangguran di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Sumsel juga merancang IMT-GT LMI System (Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja) yang dapat menghubungkan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengentasan kemiskinan melalui SIGertak. SIGertak merupakan Sistem Informasi Keselarasan permasalahan dan program, keselarasan lokasi dengan kantong kemiskinan, keselarasan sasaran dengan data Basis data Terpadu (BDT) dalam Penanggulangan Kemiskinan untuk seluruh *Stakeholder*.

Manfaat SIGertak yaitu membantu *stakeholder* menganalisa variabel kemiskinan dengan mudah, efektif dan efisien; mensinergikan perencanaan dan penganggaran program kemiskinan antar sektor dan daerah; serta meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.***



Gambar: Jembatan Ampera, Palembang



BAB VIII

KESIMPULAN



Gambar: Museum Angkut, Kota Batu

Kesimpulan dalam buku ini bukan seperti yang biasa dibuat sebagai akhir sebuah tulisan, karena suatu proses tidak pernah mencapai titik akhir. Bahkan penulis AS, Arthur Bloch mengatakan, “*A conclusion is a place when you get tired of thinking.*”

Kendati demikian, buku ini ditutup dengan beberapa catatan.

Pertama, Otonomi Daerah dengan berbagai kelemahannya telah mendorong daerah berlomba membuat terobosan dalam perencanaan pembangunan dan berupaya mencapai berbagai sasaran pembangunan. Semua itu dimaksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya, sekaligus memajukan pembangunan manusia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah daerah berlomba membuat berbagai inovasi, dan memanfaatkan teknologi informasi agar bisa memantau, melakukan evaluasi dan mengawasi implementasi perencanaan pembangunan.

Kedua, Pemerintah Daerah menyadari semakin tingginya tuntutan masyarakat di era keterbukaan informasi sehingga berusaha memberikan pelayanan publik di berbagai sektor dengan sebaik-baiknya, antara lain, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Ketiga, kesadaran yang semakin tinggi pada berbagai pihak untuk mengurangi kerusakan lingkungan sebagai dampak pembangunan.

Pada beberapa daerah juga terlihat kepedulian yang menonjol dengan program-program berkelanjutan bagi kaum yang dipinggirkan. Misalnya lansia, khususnya yang miskin dan tidak memiliki keluarga.

Sebagai catatan, jumlah lansia yang terus meningkat – sebagian besar tidak punya asuransi dan hidup bergantung pada anggota keluarga -- akan mengubah struktur demografi di Indonesia sehingga dibutuhkan persiapan dan dukungan berbagai pihak, termasuk dukungan kebijakan.

Keempat, Indonesia terletak di wilayah cincin api. Subur, tetapi kerawanannya sangat tinggi terhadap bencana alam. Sayangnya di berbagai daerah masih belum terlihat terobosan atau inovasi yang terstruktur di bidang kebencanaan.

Kelima, gairah membangun di daerah hendaknya mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Antara lain, melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi antar lembaga sehingga tidak ada keraguan di daerah untuk melakukan inovasi sebagai tanggapan atas situasi yang tidak terduga sehingga tidak tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan merupakan perpaduan dari seni dan sains. Oleh sebab itu, seharusnya ada keseimbangan antara keduanya. Namun sampai saat ini tampaknya, bagian sains masih lebih berat dibandingkan seni dalam perencanaan sehingga kesannya rigid, kaku. Karena terlalu kaku, implementasinya sulit disesuaikan dengan situasi masyarakat yang sangat dinamis. Kendati demikian, seni dalam implementasi pun harus ada batasan-batasannya sehingga tetap terukur.

Keenam, tanpa pertumbuhan yang berkelanjutan di berbagai sektor kehidupan, maka istilah “sukses” dan “keberhasilan” tidak punya makna.

Ketujuh, seluruh “pencapaian” yang diungkapkan di dalam buku ini berada pada tahapan suatu proses yang panjang. Artinya, kemajuan yang sudah dicapai suatu daerah dapat dipertahankan, bahkan terus meningkat dan disempurnakan. Atau malah mundur karena dinamika politik lokal setelah pemimpin yang progresif dan inovatif dalam upaya memajukan daerah, berakhir masa tugasnya. ***

Tim Penulis dan Editor,

Jakarta, Desember 2018.







Gambar: Pantai Batu Payung, NTB



Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas

Jalan Sunda Kelapa No. 9, Menteng, Jakarta Pusat
No. Phone/Fax: 021-3926248



ISBN 978-623-90225-3-2



9 786239 022532

Gambar : Penambang Selerang, Kawah Ijen, Banyuwangi